

# **DISKUSI PUBLIK**

## **Mendorong Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas**

Indonesia Corruption Watch  
Jakarta, 19 Agustus 2019



# PENDAHULUAN

- ICW bekerjasama dengan 4 mitra di daerah telah melaksanakan survei kepada 800 orang penyandang disabilitas.
- Lokasi survei: Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Makassar, dan Kota Kupang.
- Survei dilaksanakan selama bulan April 2019.



# TUJUAN SURVEI

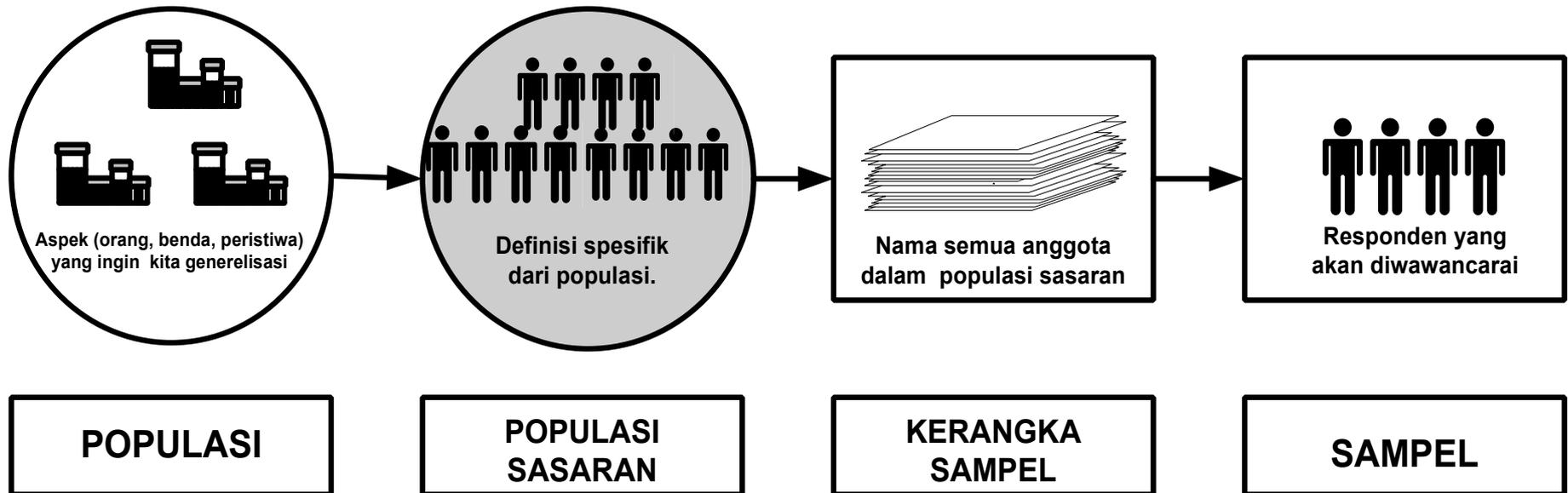
- Ingin mengetahui pemahaman, pendapat (persepsi), dan pengalaman penyandang disabilitas terkait akses layanan kesehatan.
- Informasi ini sangat berguna untuk memetakan kebutuhan dan kesulitan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan.



# 10 Informasi yang dicari

1. Kondisi dan profil penyandang disabilitas
2. Akses terhadap fasilitas kesehatan
3. Penilaian atas layanan kesehatan dan tenaga kesehatan
4. Penilaian atas fasilitas terkait kebutuhan penyandang disabilitas
5. Asuransi kesehatan dan pengalaman dalam menggunakan kartu asuransi ketika berada di fasilitas kesehatan
6. Pengalaman mengalami diskriminasi
7. Bantuan dari pemerintah terhadap penyandang disabilitas
8. Akses informasi terkait bantuan dan anggaran bagi penyandang disabilitas

# METODE SURVEI



# METODE SURVEI -

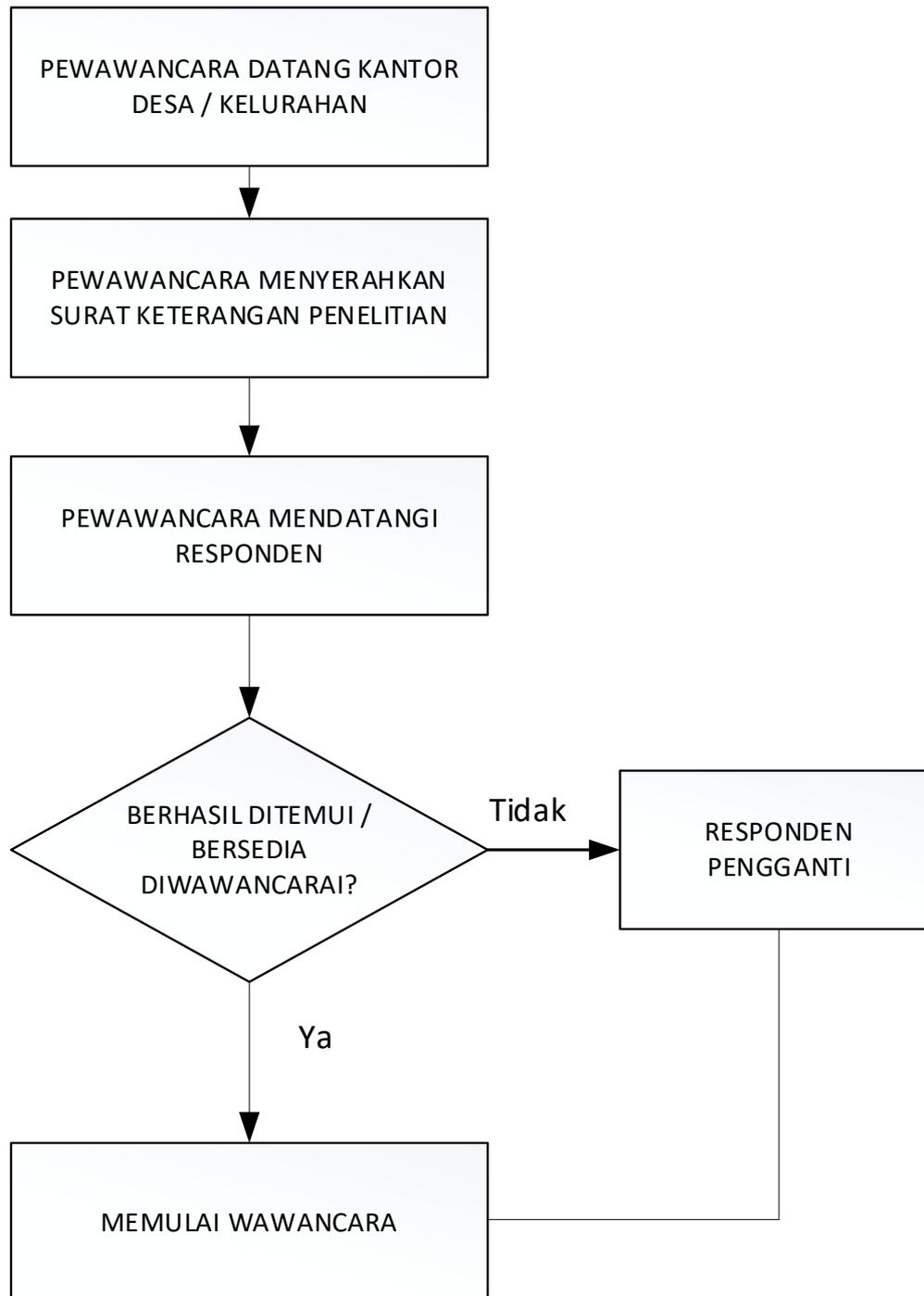
## 3 Tahap Penarikan Sampel

No.	Tahap	Deskripsi
1.	Pemilihan Kecamatan	Di masing-masing kota survei (Bandung, Makasar, Solo dan Kupang), diambil 5 kecamatan sebagai sampel.
2.	Pemilihan Kelurahan	Di masing-masing kecamatan, diambil secara acak, 5 kelurahan. Total di masing-masing kota survei (Bandung, Makasar, Solo dan Kupang), terdapat 25 kelurahan sampel.
3.	Pemilihan Responden	Peneliti menyusun daftar nama-nama penyandang disabilitas di 25 kelurahan sampel. Kerangka sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik acak stratifikasi, dengan memperhitungkan: (a) Gender; dan (b) Jumlah penyandang disabilitas per kelurahan.



# METODE SURVEI

- Teknik wawancara: face to face interview di lokasi tempat tinggal responden.
- Prinsip Inklusivitas: semua penyandang disabilitas (apapun bentuk disabilitas) diwawancarai. ICW dan mitra peneliti lokal menggunakan tenaga pendamping agar semua responden dapat berpartisipasi dalam survei ini.





# PERMASALAHAN DAN KERANGKA SAMPLING

Survei menggunakan teknik penarikan sampel acak yang membutuhkan daftar nama anggota populasi.

Kerangka sampel menggunakan data DPT dari KPUD.

Data di Dinas Sosial Kabupaten/Kota tidak cukup baik digunakan untuk kerangka sampel karena:

- 1) Tidak terdapat nama penyandang disabilitas
- 2) Jika ada nama, adalah nama di penampungan Dinas Sosial
- 3) Ada nama dan alamat tetapi tidak up to date karena nama penyandang disabilitas merujuk pada data 5 tahun lalu.

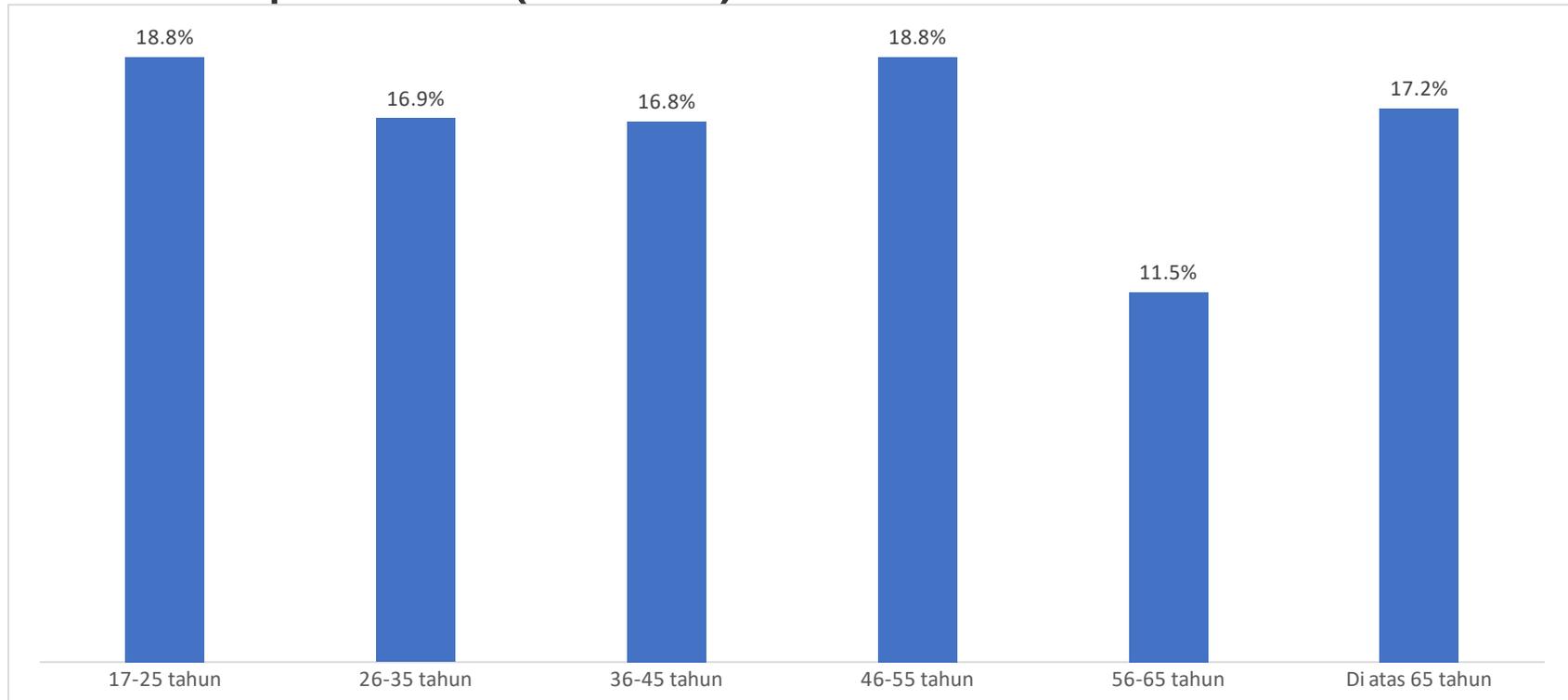


# HASIL SURVEY

1. Profil responden
2. Akses fasilitas dan layanan kesehatan
3. Penilaian atas layanan kesehatan
4. Diskriminasi layanan kesehatan
5. Seputar jaminan kesehatan
6. Pengalaman menggunakan JKN
7. Seputar Kartu Penyandang Disabilitas
8. Bantuan Pemerintah

# 1. PROFIL RESPONDEN

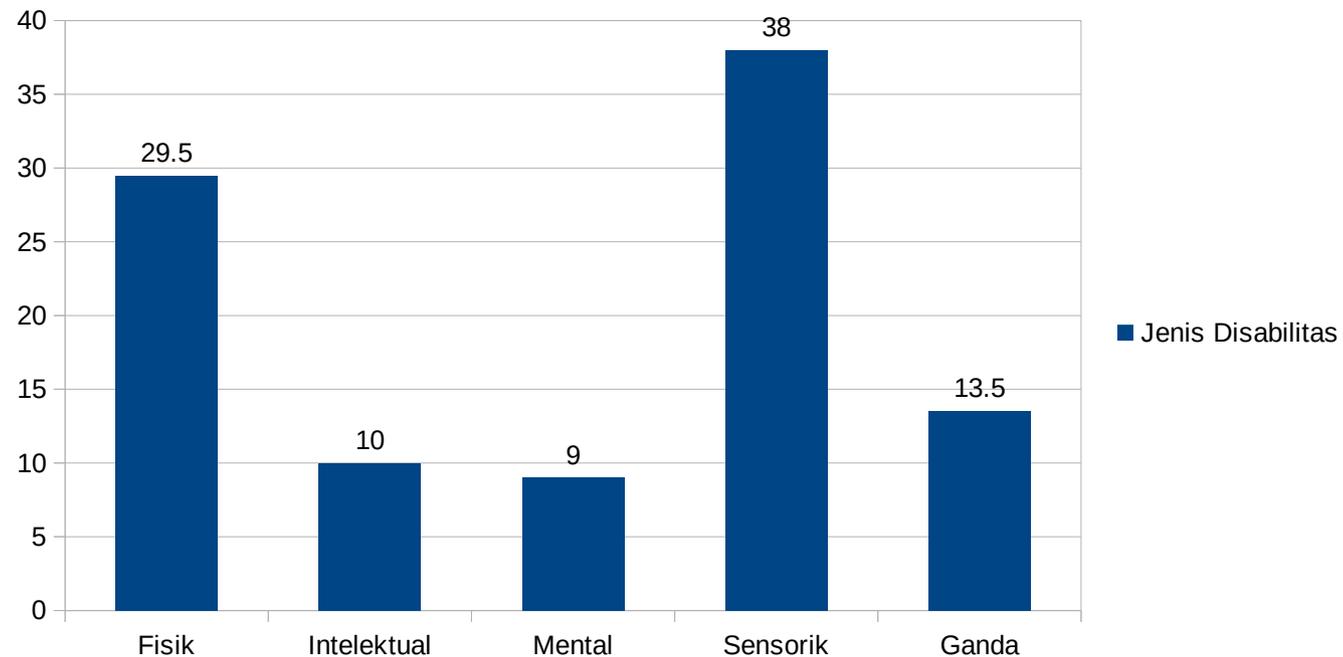
## ◆ Usia Responden (N: 792)



## ◆ Jenis Kelamin: Laki-laki 420 orang dan perempuan 380 orang (N: 800)

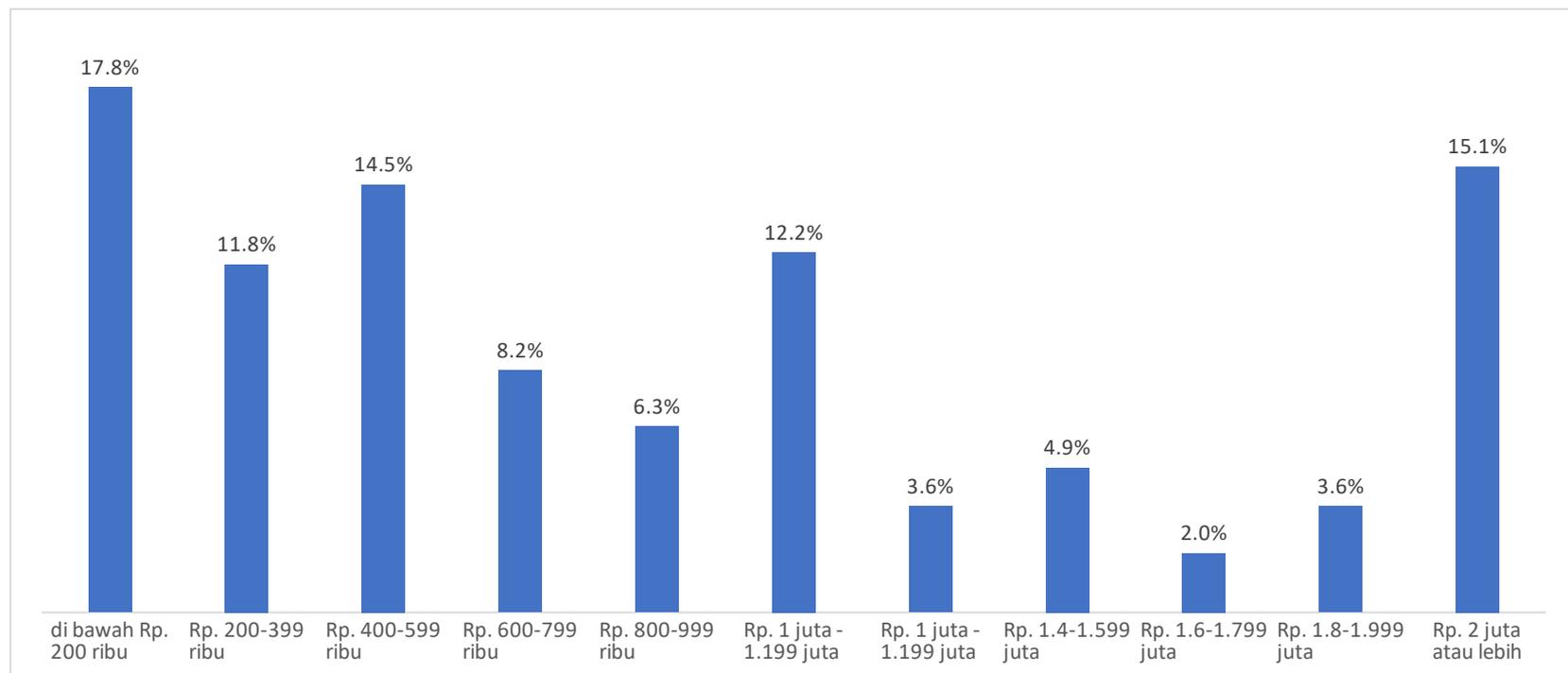
◆ Status (N=797): Belum Menikah (406), Menikah (292), Duda/Janda meninggal (75), Duda/Janda bercerai (24)

◆ Jenis Disabilitas (N: 799)

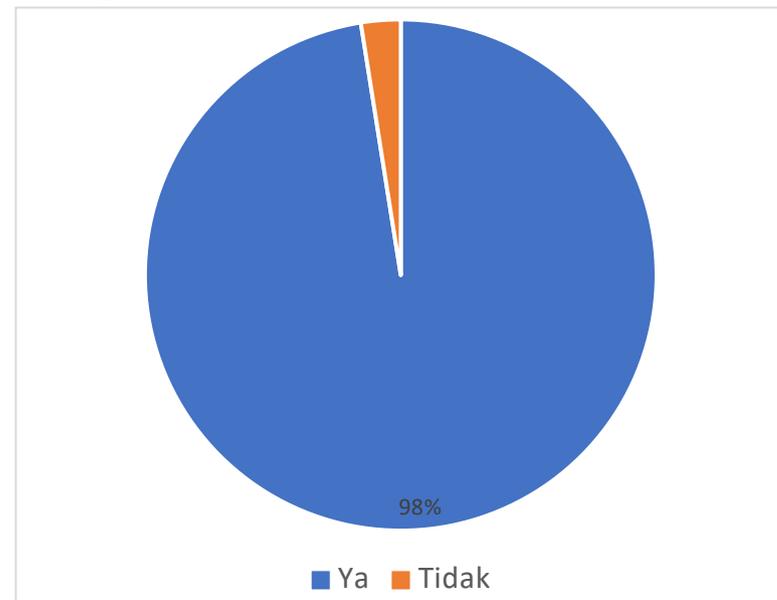
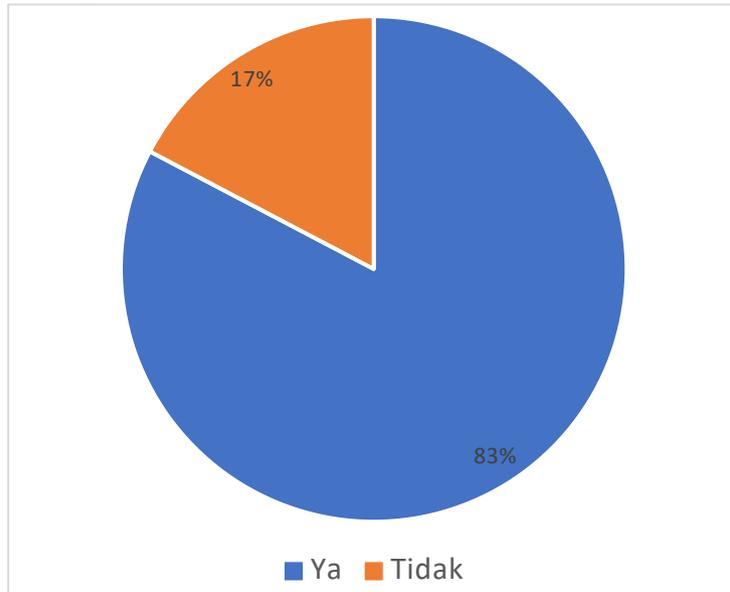


◆ Pendidikan (N=795): Tidak Bersekolah (323), Pendidikan Rendah (226), Pendidikan Menengah (204), Pendidikan Tinggi (42)

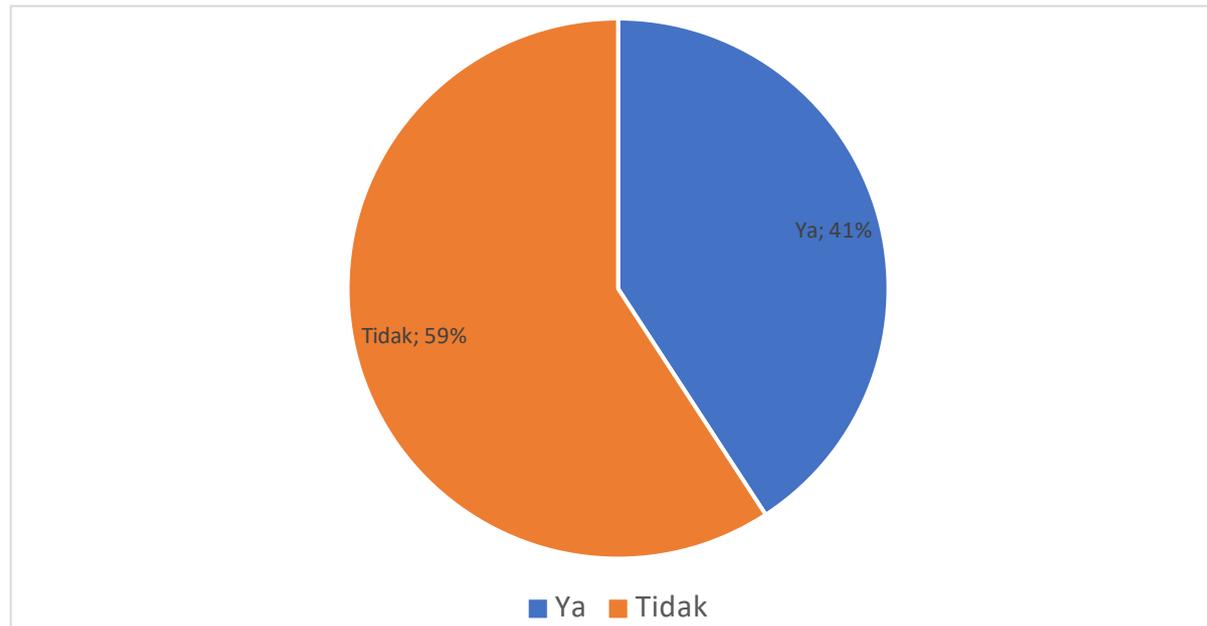
- ◆ Pekerjaan (N=796): Pegawai (41), Pedagang (147), Buruh (53), Pelajar (41), Pensiunan (24), Tidak Bekerja (367), Ibu Rumah Tangga (76), Lainnya (47).
- ◆ Penghasilan (Khusus untuk responden yang bekerja, N=304)



## ◆ Kepemilikan Dokumen Kependudukan (N:798)

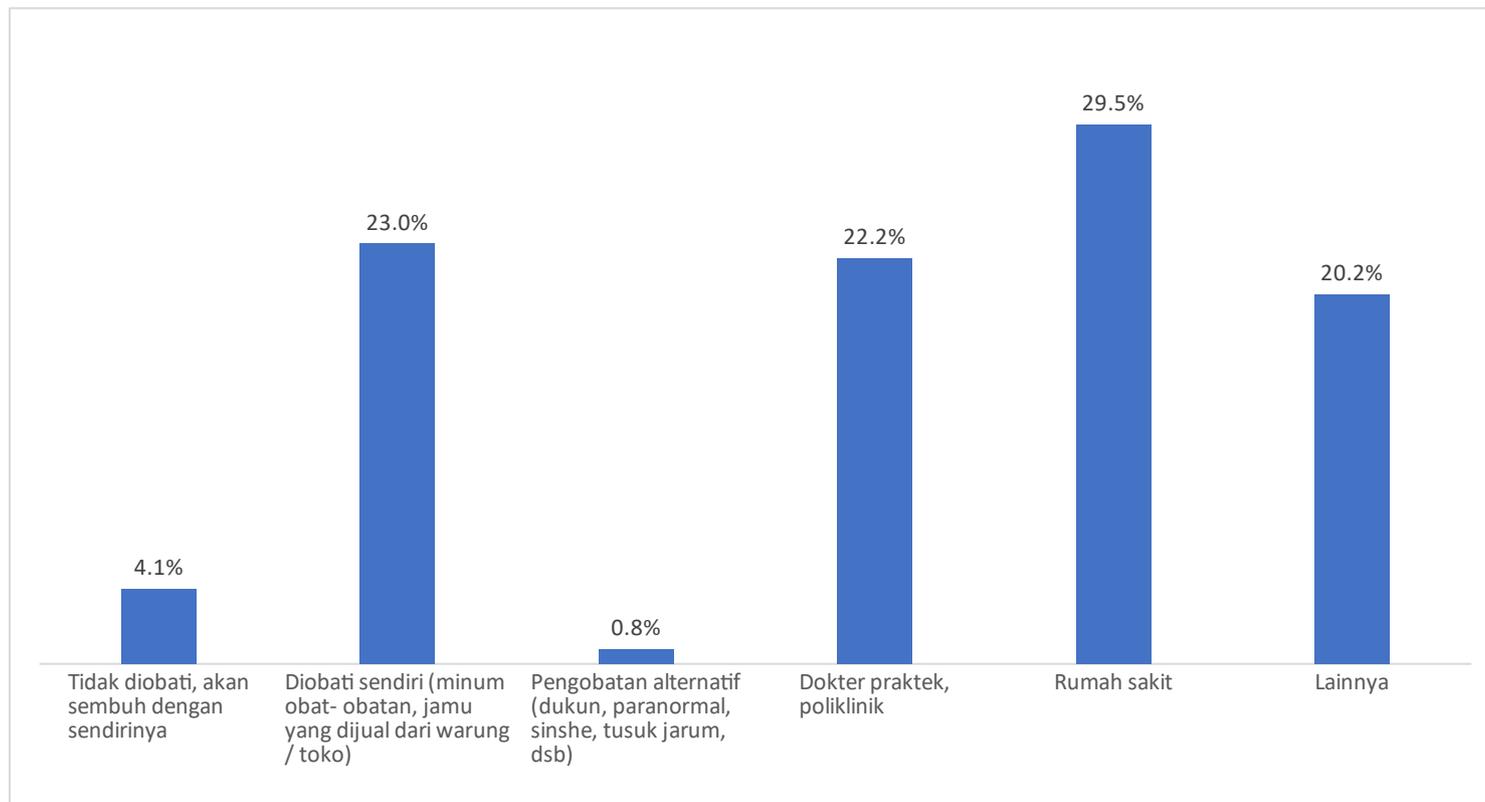


## ◆ Kepemilikan Alat Bantu (N:796)

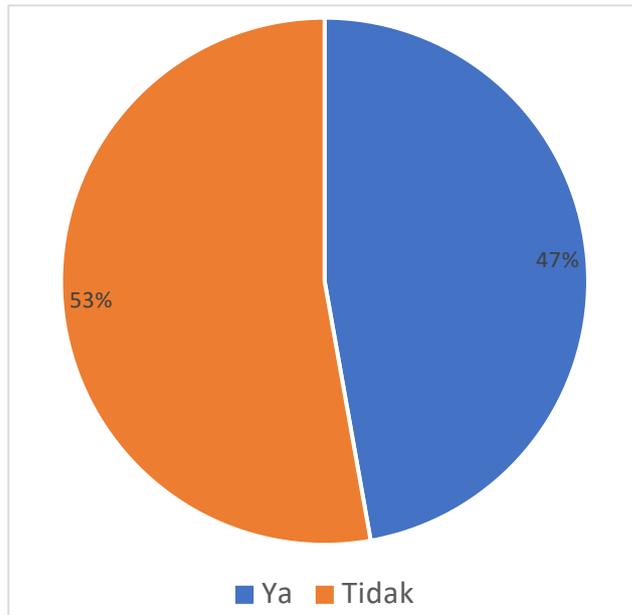


## 2. AKSES FASILITAS DAN LAYANAN KESEHATAN

### ◆ Tempat pengobatan (N:796)

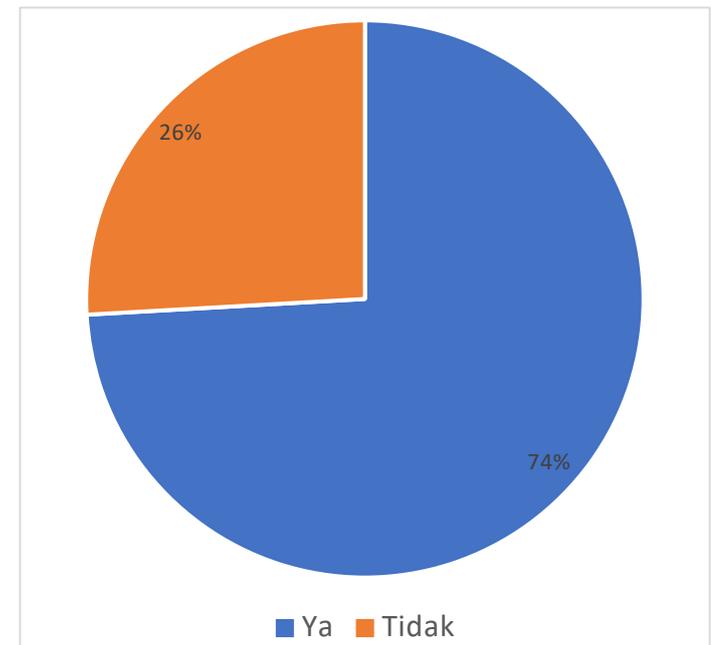


## ◆ Fasilitas Kesehatan (N:791)



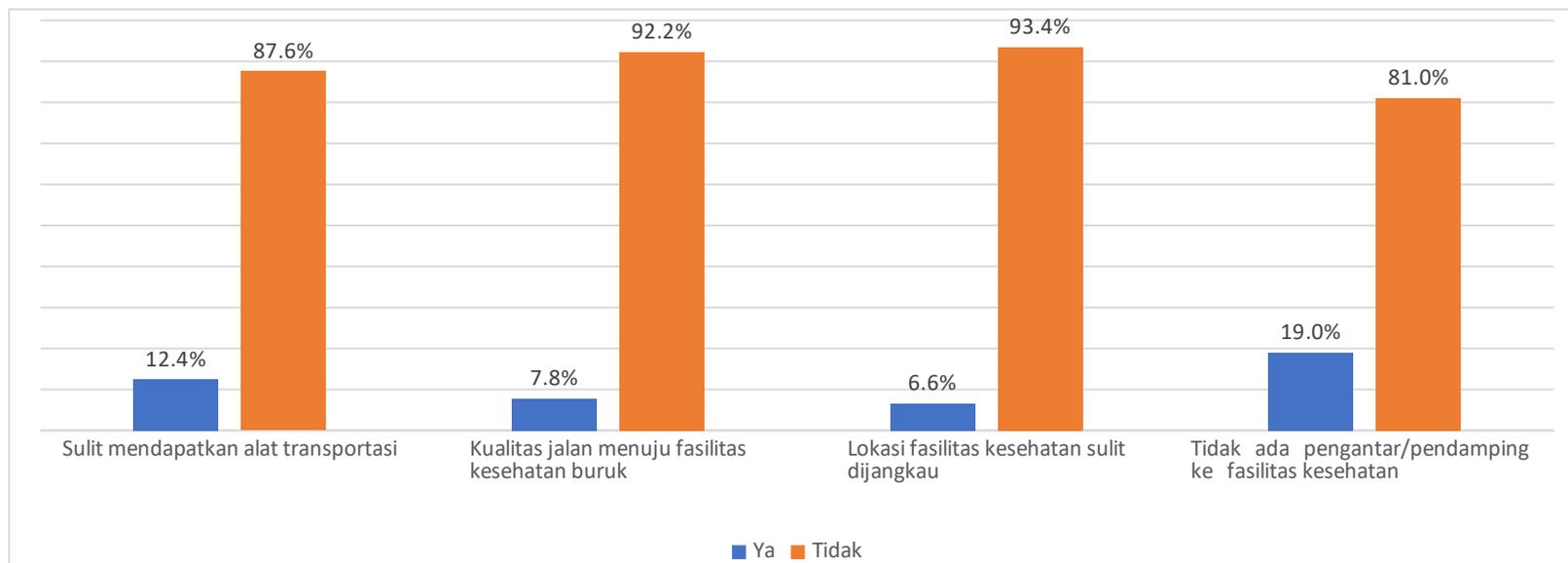
Apakah dalam 1 tahun terakhir (Maret 2018 - Maret 2019) Anda pernah berobat di fasilitas kesehatan?

Apakah Anda menggunakan kartu JKN dalam mengakses fasilitas kesehatan tersebut? (Hanya untuk responden yang pernah berobat dalam 1 tahun terakhir, N:387)



Fasilitas kesehatan yang terakhir kali dikunjungi (N=387): Puskesmas (43%) dan RSUD (27.6%)

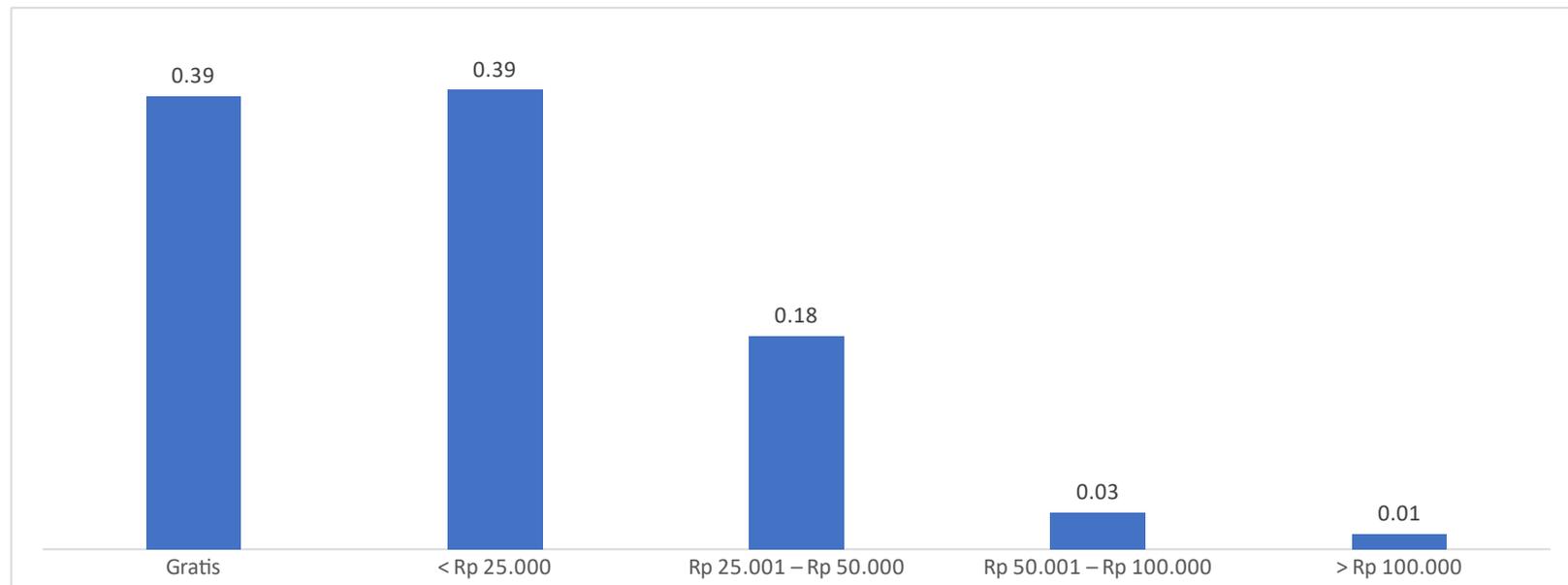
- ◆ Layanan Kesehatan (N=387): Rawat jalan (65.5%), check up (18.2%), rawat inap (11.7%).
- ◆ Alasan memilih fasilitas kesehatan (N=387): karena dekat dengan rumah (63.8%).
- ◆ Kesulitan yang dihadapi ketika berobat (N=387)



- ◆ Lokasi Fasilitas Kesehatan (N=387): <1km (39,4%), 1-5 km (47.5%), >5km (13.1%)

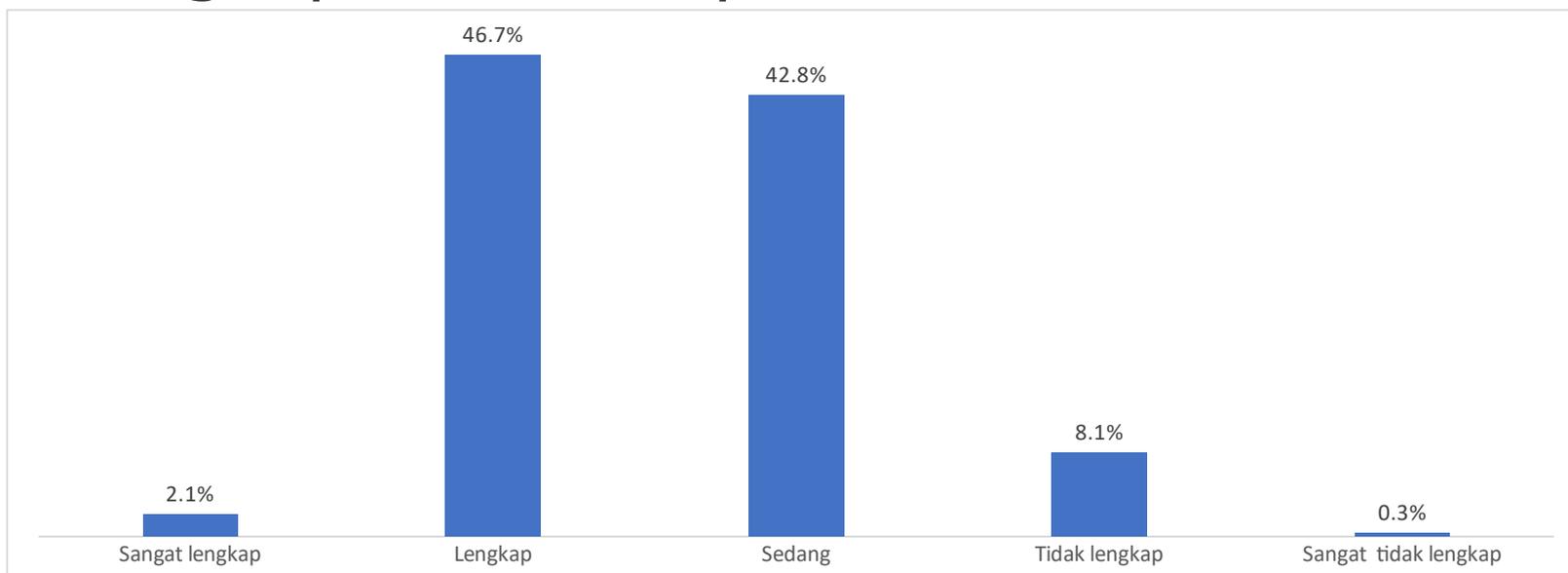
Penyandang disabilitas umumnya menjangkau lokasi fasilitas kesehatan (N=387): dengan kendaraan umum (40.1%) dan motor pribadi (31.9%).

Biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau fasilitas kesehatan (N=387)



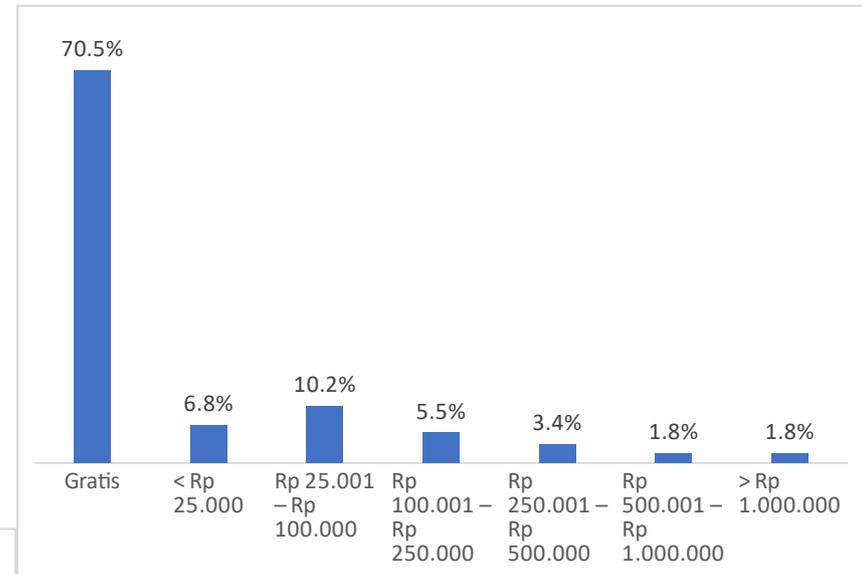
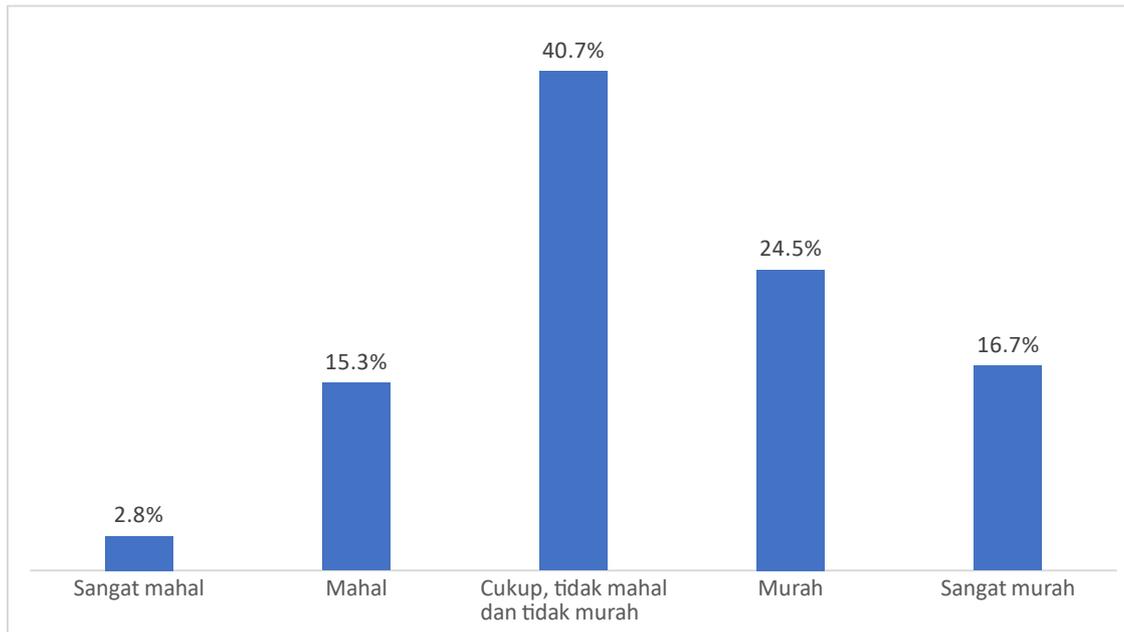
# 3. PENILAIAN ATAS LAYANAN KESEHATAN

- ◆ Proses Layanan di Fasilitas Kesehatan (N=387): cepat (45.3%), sedang (42.7%), lama (7.8%).
- ◆ Waktu Tunggu di Fasilitas Kesehatan (N=387): cepat (29.8%), sedang (49.7%), lama (17.1%).
- ◆ Kelengkapan sarana-prasarana di Faskes (N=387)



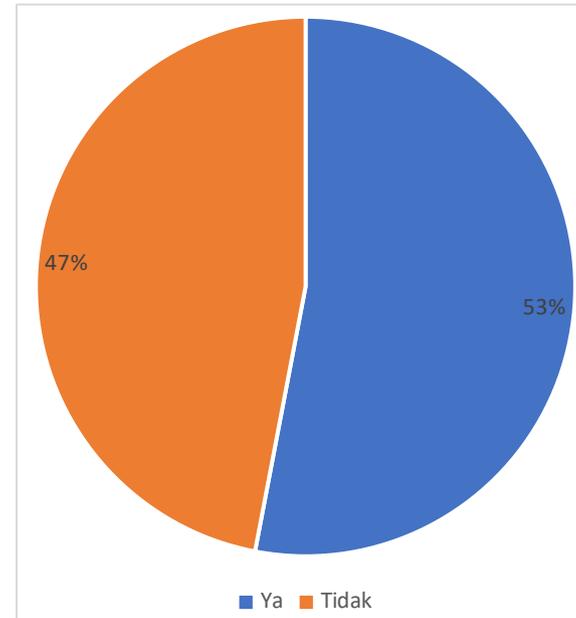
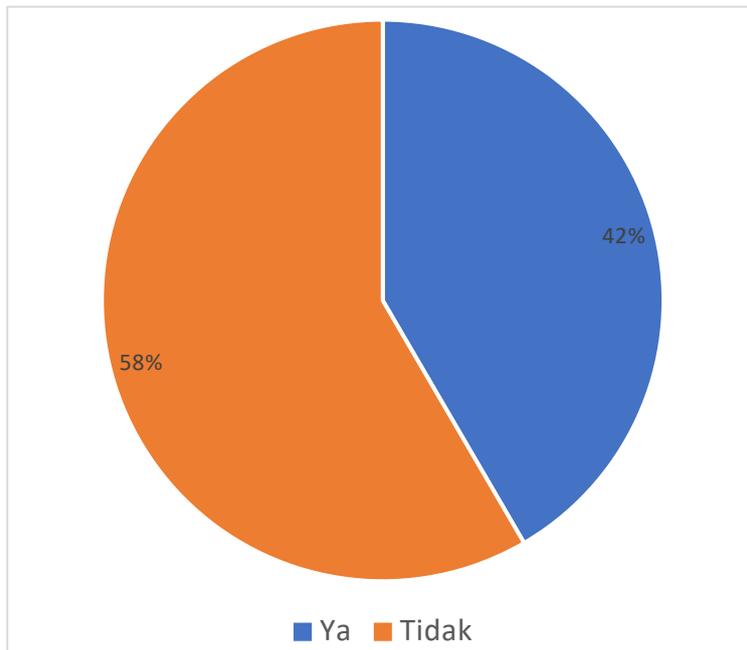
- ◆ Layanan Tenaga Kesehatan di Faskes (N=387): mayoritas menilai layanan kesehatan baik.

## ◆ Biaya Pengobatan (N=387)



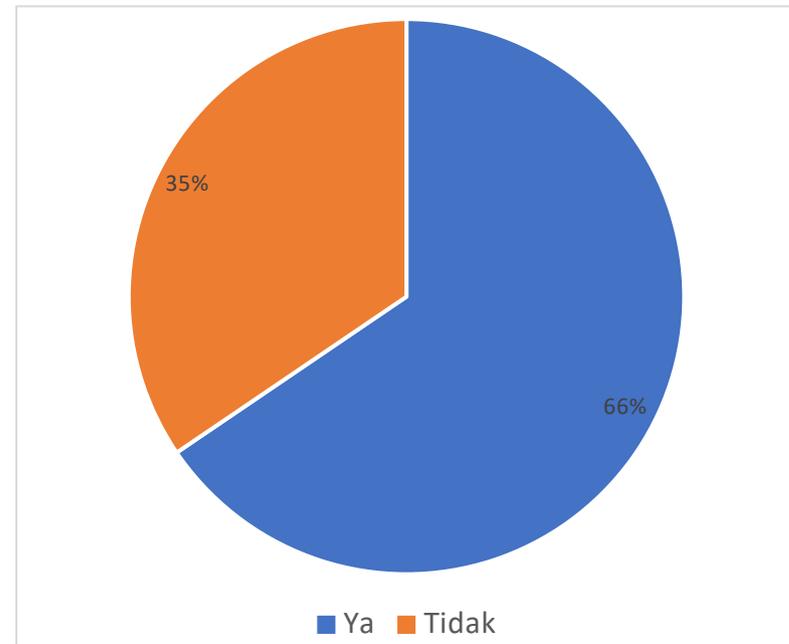
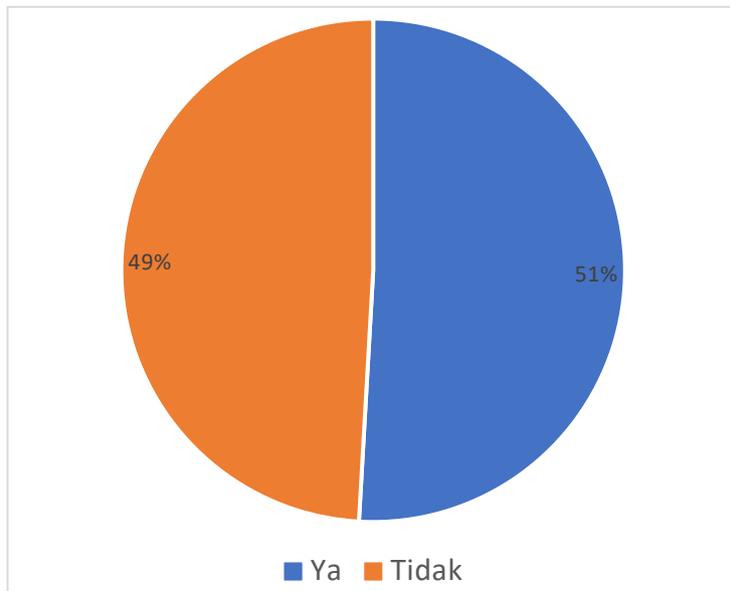
- ◆ Fasilitas Bagi Penyandang Kesehatan (N=387): baik (63,5%), sedang (29.5%), buruk (2.4%).

Ketersediaan ramp/  
plengsengan/  
bidang miring



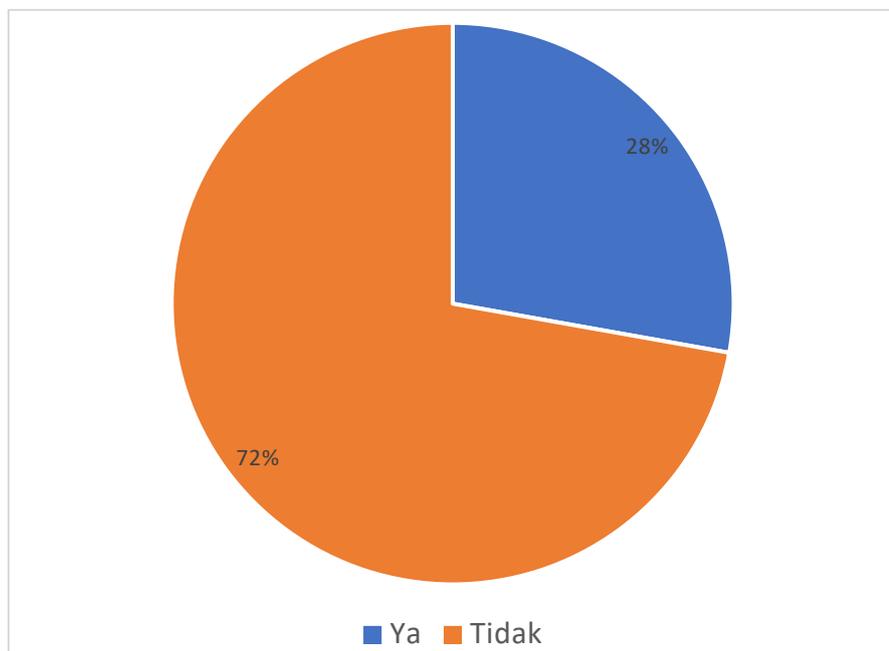
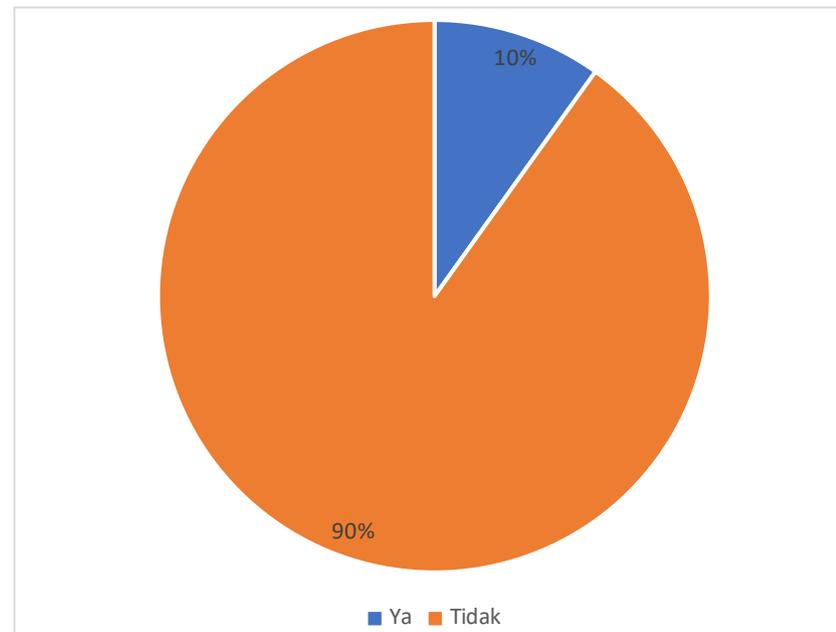
Ketersediaan  
handrail/pegangan  
rambat

## Ketersediaan kursi roda

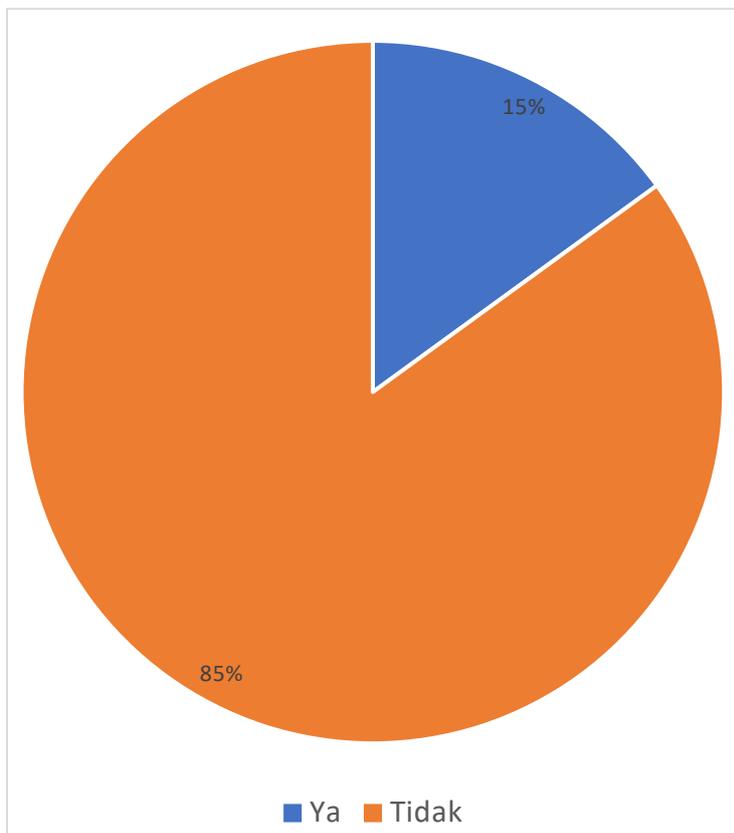


## Ketersediaan komputer pembaca nomor urut

## Ketersediaan huruf braille

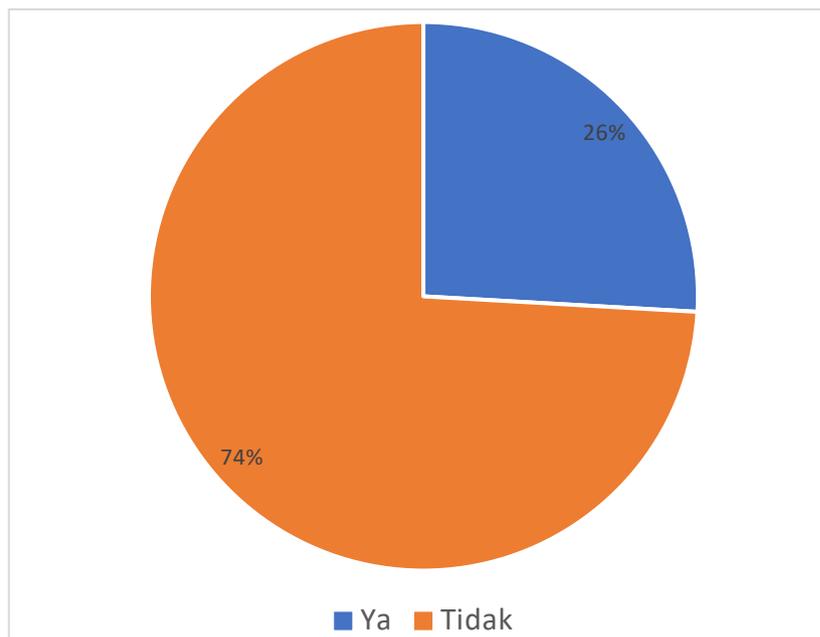


## Ketersediaan toilet penyandang disabilitas



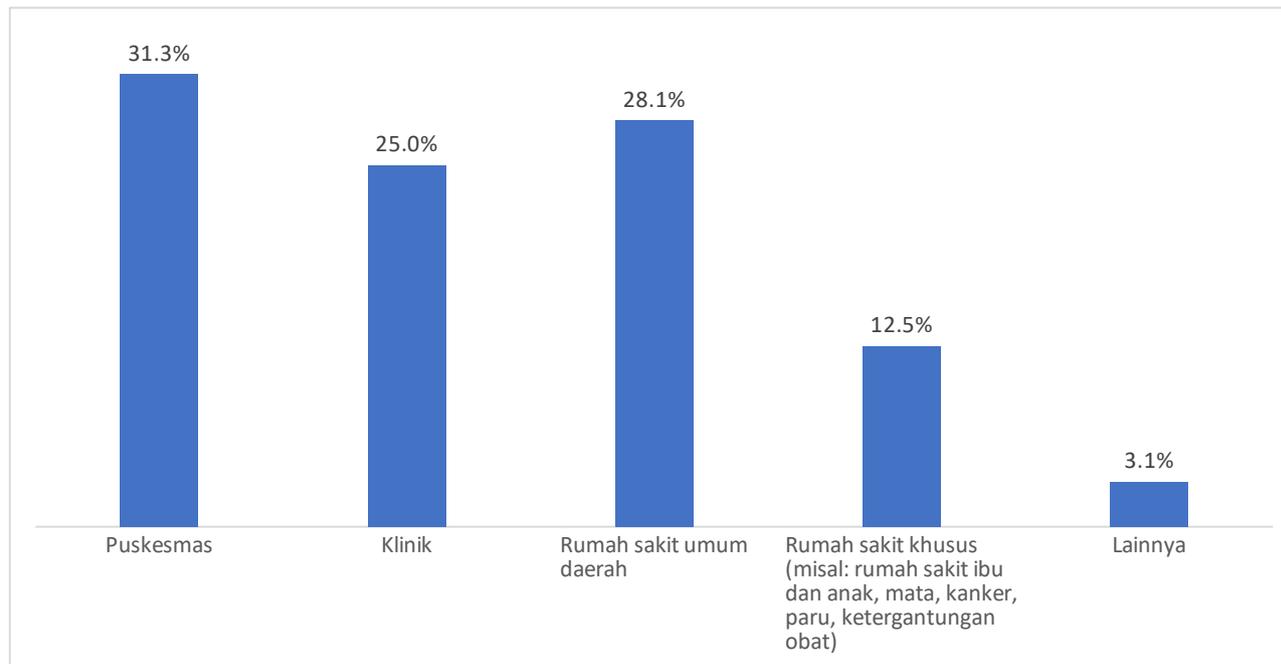
Ketersediaan loket/jalur khusus penyandang disabilitas

◆ Kemampuan Tenaga Kesehatan (N=387)



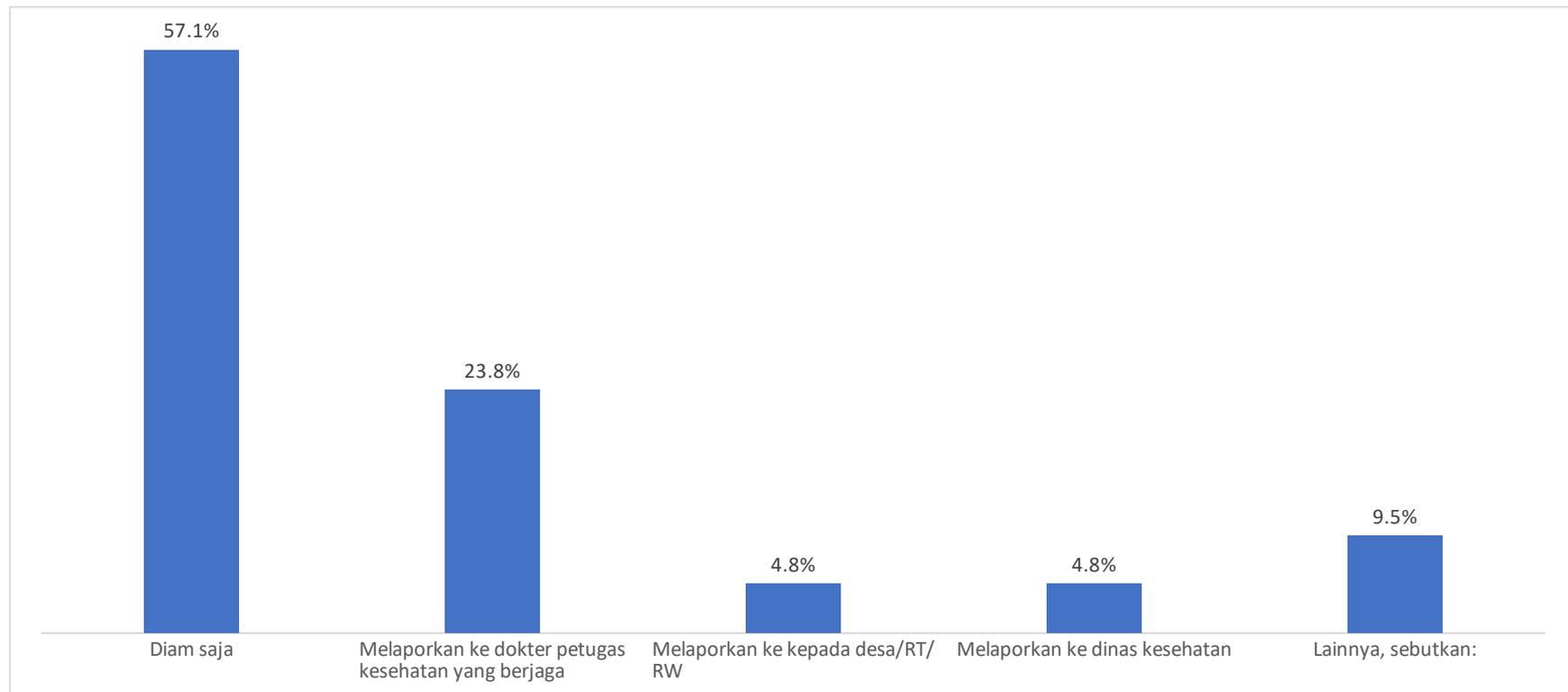
# 4. DISKRIMINASI LAYANAN KESEHATAN

Pernah mendapat diskriminasi saat mengunjungi fasilitas kesehatan (N=788): Tidak (96.8%)



Pernah mengalami diskriminasi (N=25)

## Pelaporan diskriminasi (N=25)

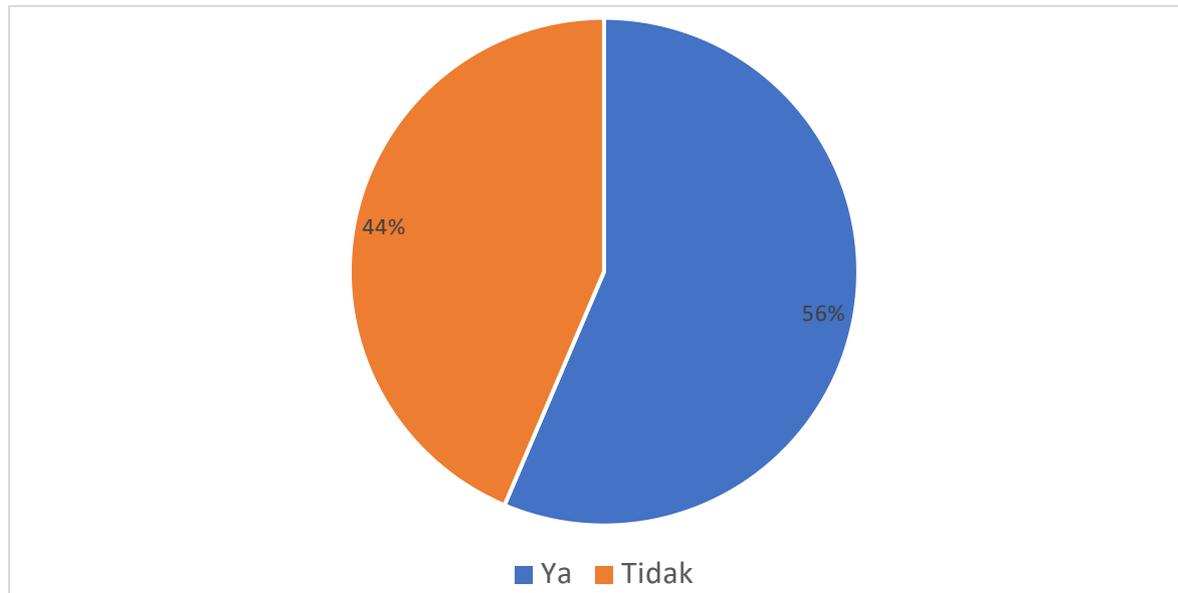


Tindak lanjut laporan (N=10) menyatakan bahwa laporannya tidak ditindaklanjuti (60%).

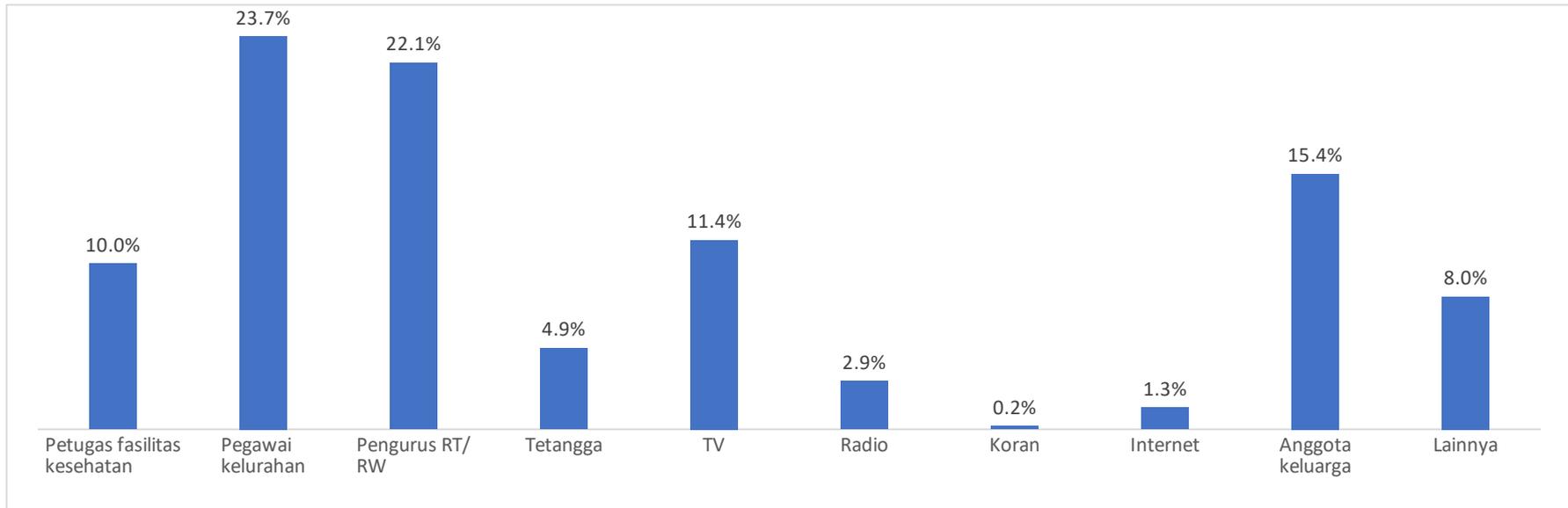
# 5. SEPUTAR JAMINAN KESEHATAN

Penyandang disabilitas mayoritas berpendidikan rendah dan tidak bekerja sehingga sangat membutuhkan asuransi kesehatan untuk berobat.

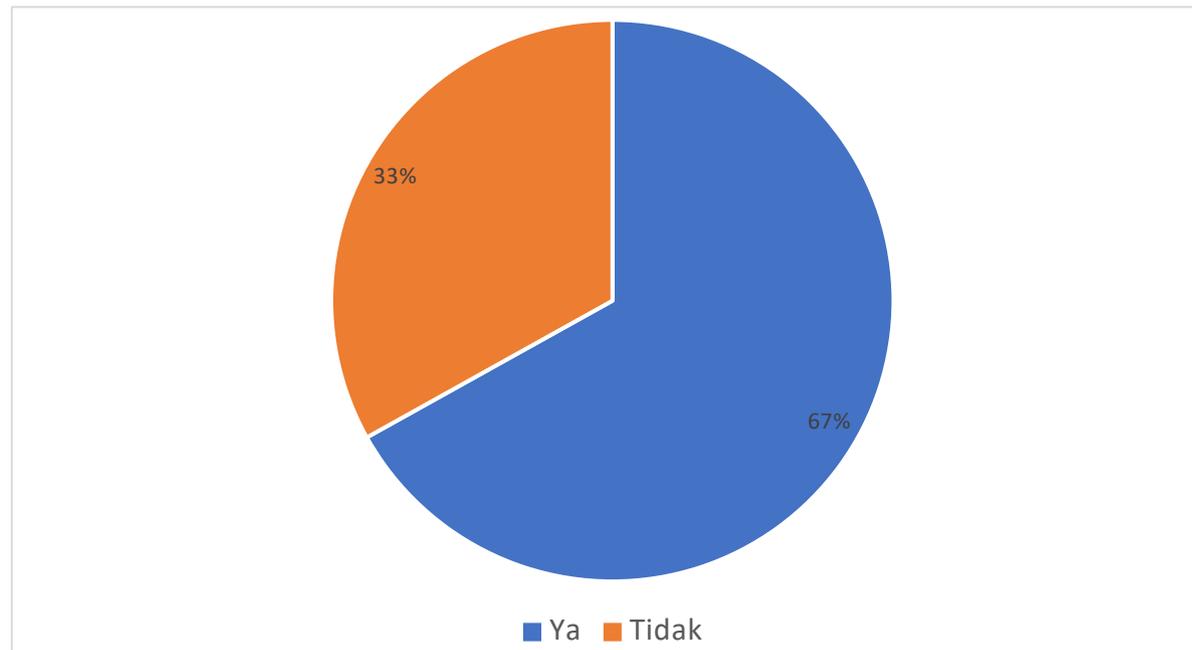
- ♦ Pengetahuan mengenai JKN (N=795)



## Tahu darimana mengenai JKN (N=563)



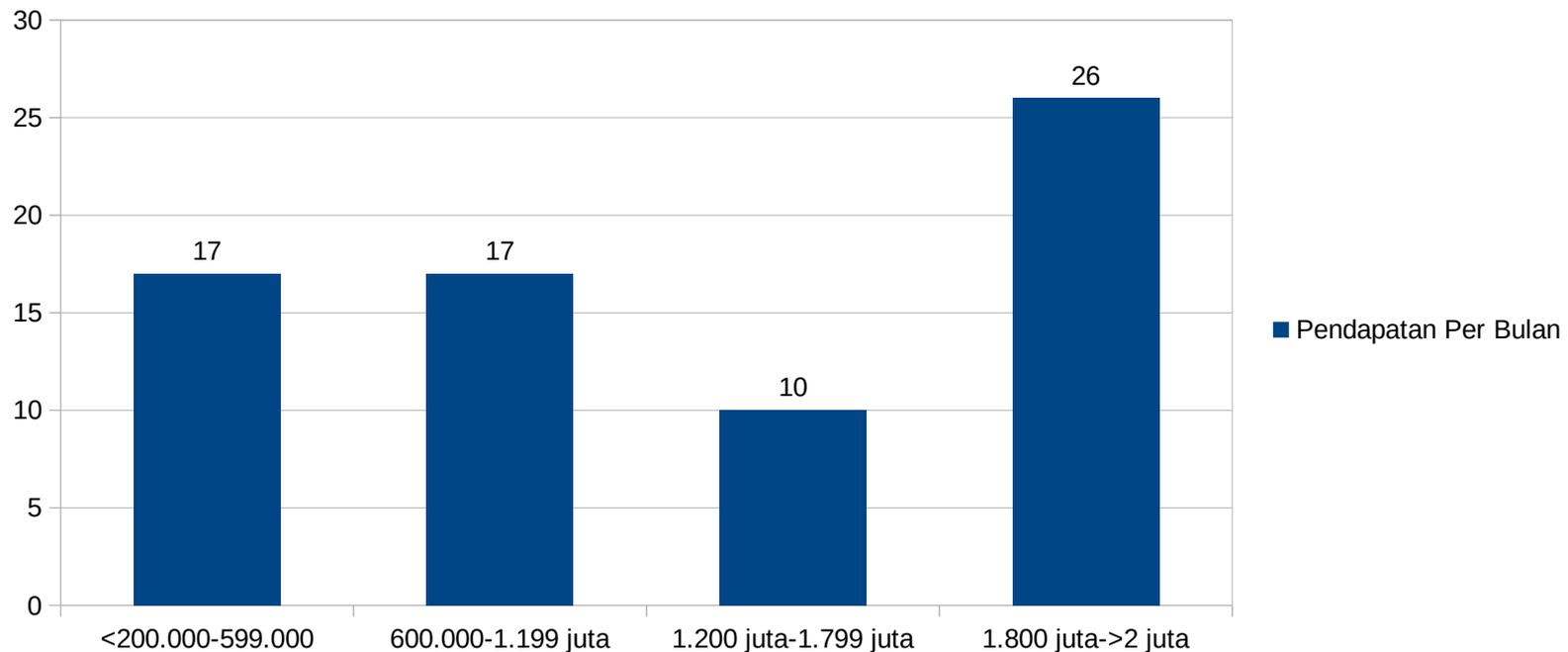
## Tahu bahwa JKN diselenggarakan BPJSK (N=563)



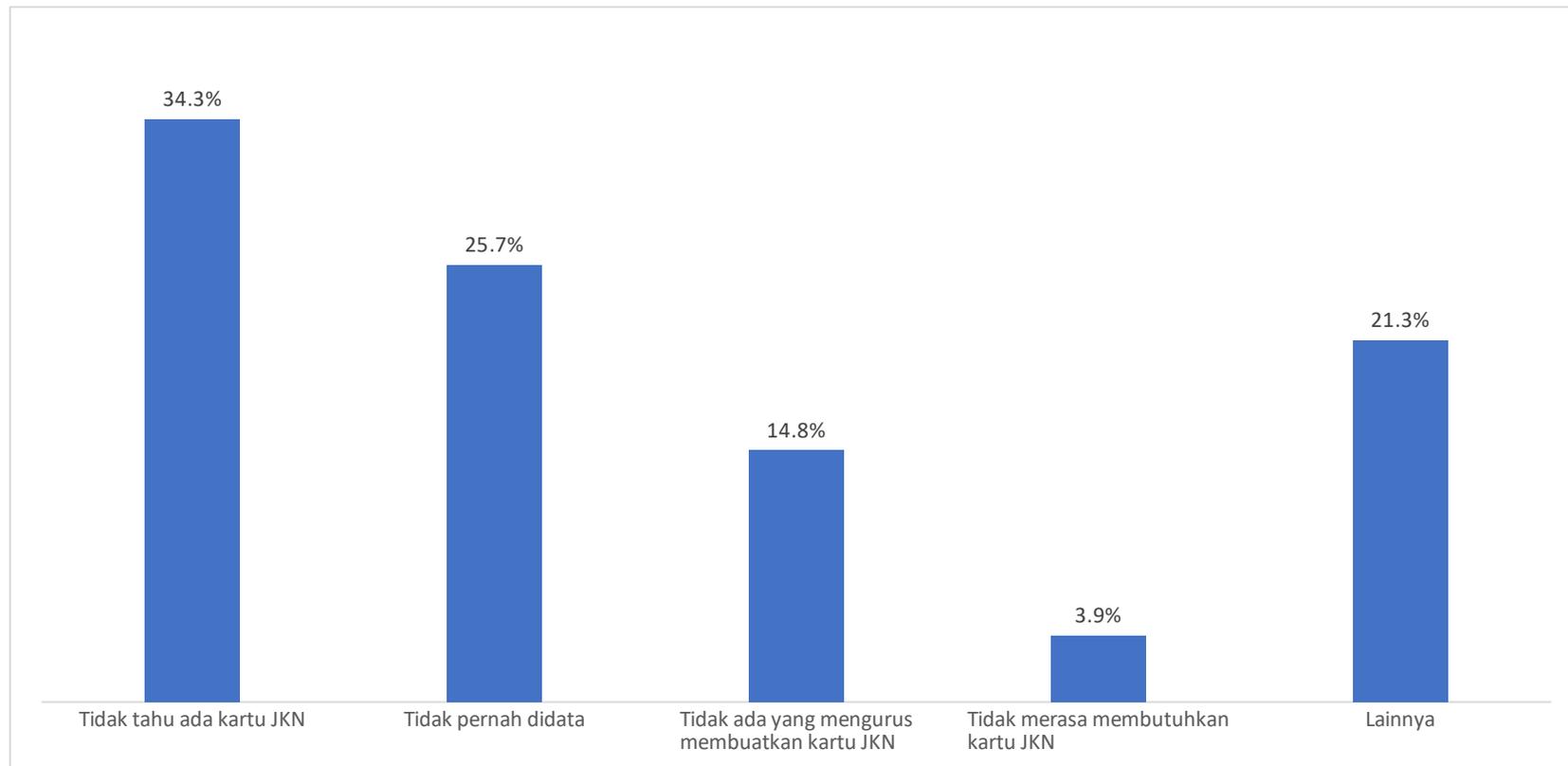
Kepemilikan JKN (N=786): 71.6% memiliki dan 28.4% tidak memiliki.

Jenis kartu JKN (N=563): PBI (71,2%), Non PBI (28,8%)

Penghasilan Non PBI (N=70):



## Alasan Tidak Memiliki JKN (N=230)

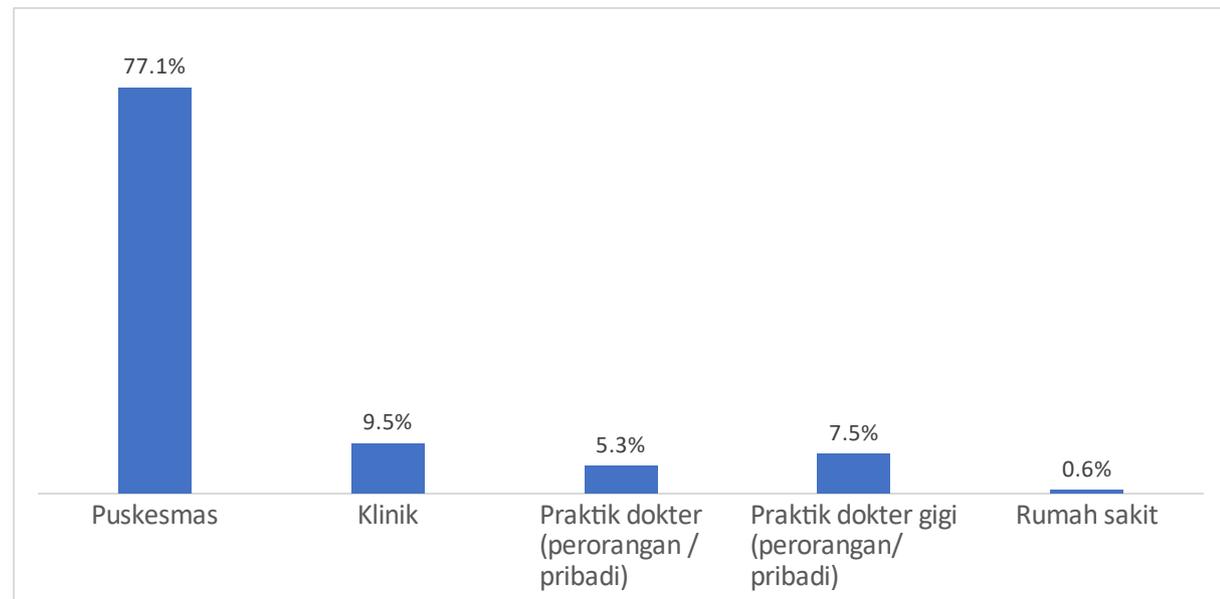
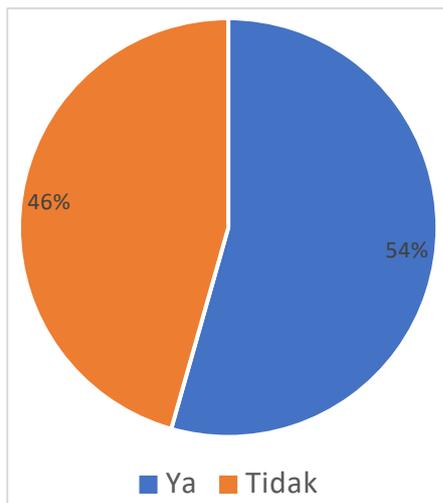


- ◆Kepemilikan Kartu Asuransi yang Lain (N=580): tidak memiliki (93.4%)

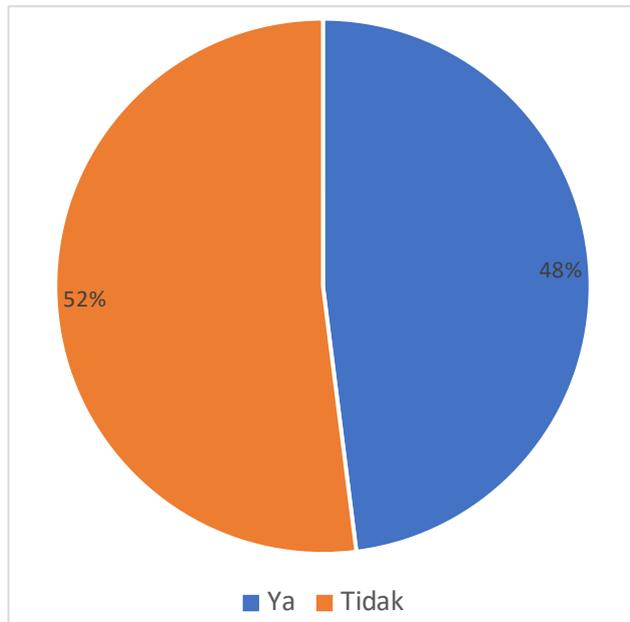
# 6. PENGALAMAN MENGGUNAKAN JKN

- ◆ Mengetahui Sistem Rujukan JKN (N=563): tahu (61,9%) dan tidak tahu (38,1%)

Tahu mengenai FKTP yang terdaftar (N=563)

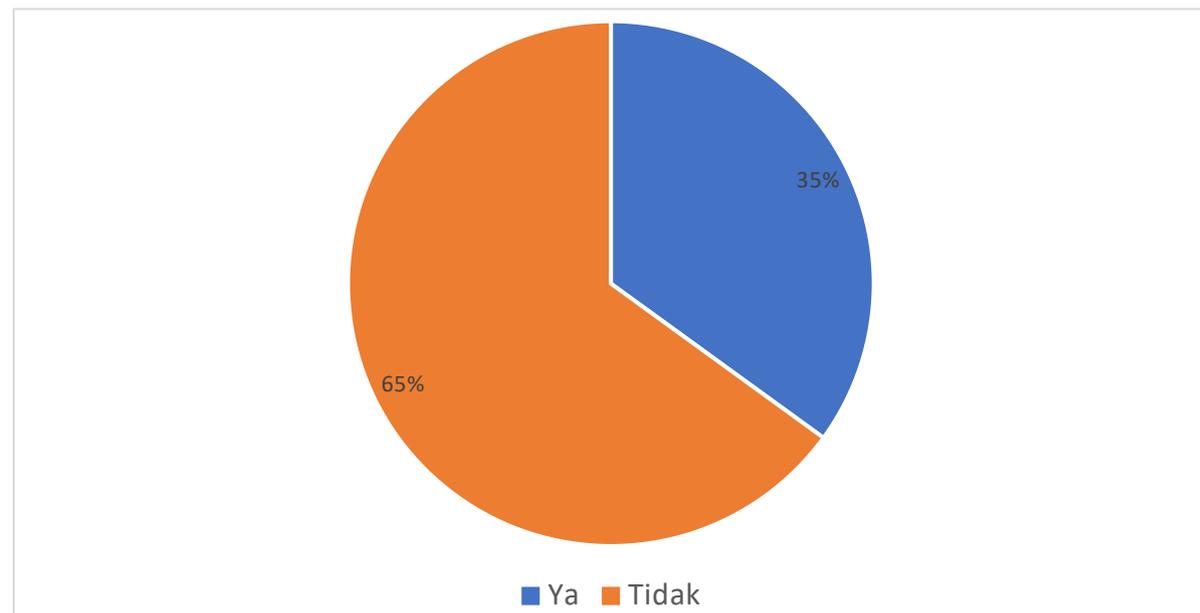


## Pengetahuan Mengenai FKRTL (N=563)

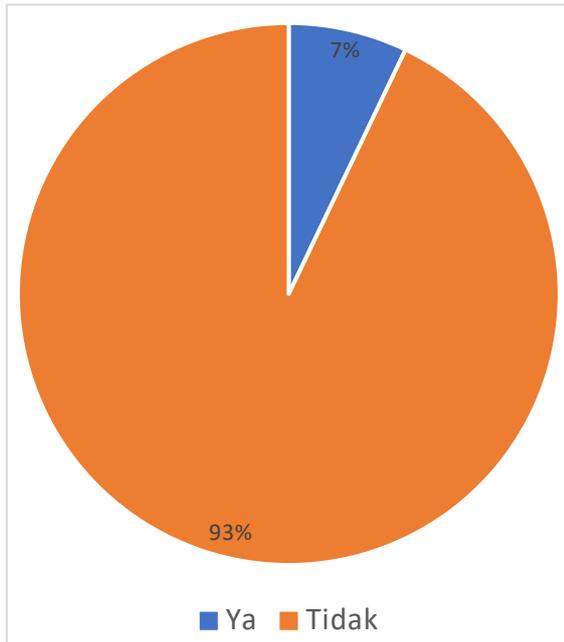


» FKRTL yang terdaftar,  
mayoritas RSUD (79%)

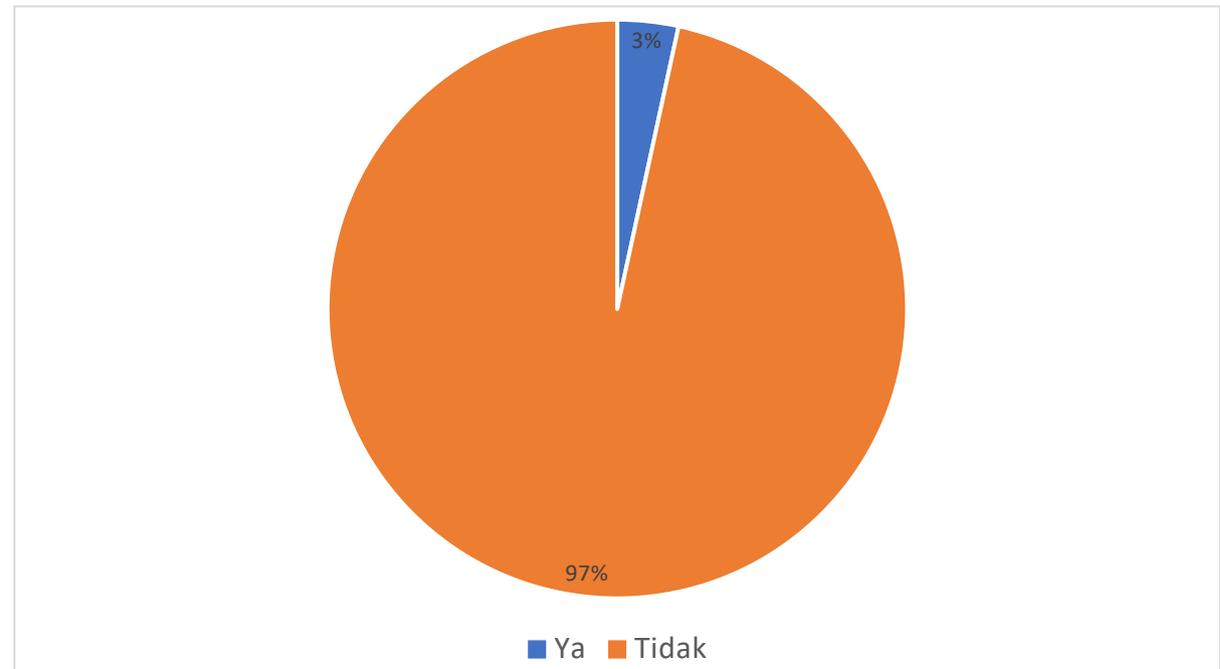
» Pernah/Tidak  
Menggunakan JKN Ketika  
Berobat (N=738)



## Kesulitan Menggunakan JKN (N=266)

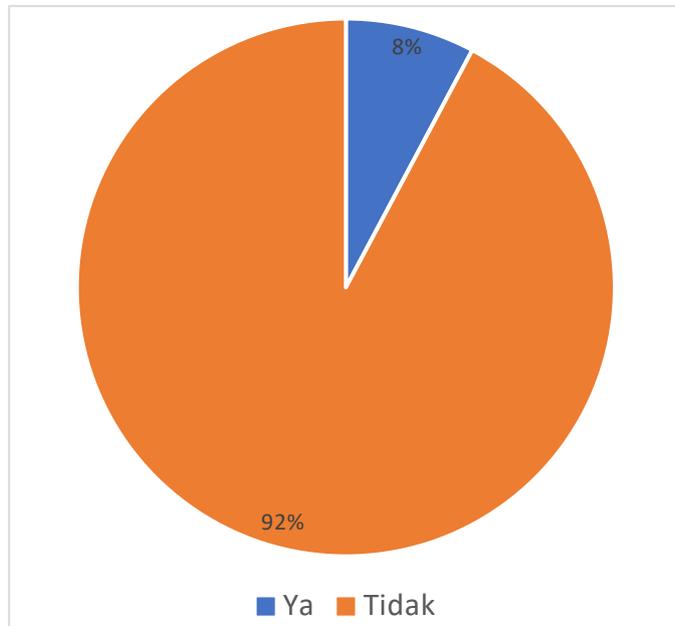


## ◆ Biaya Menggunakan JKN (N=266)

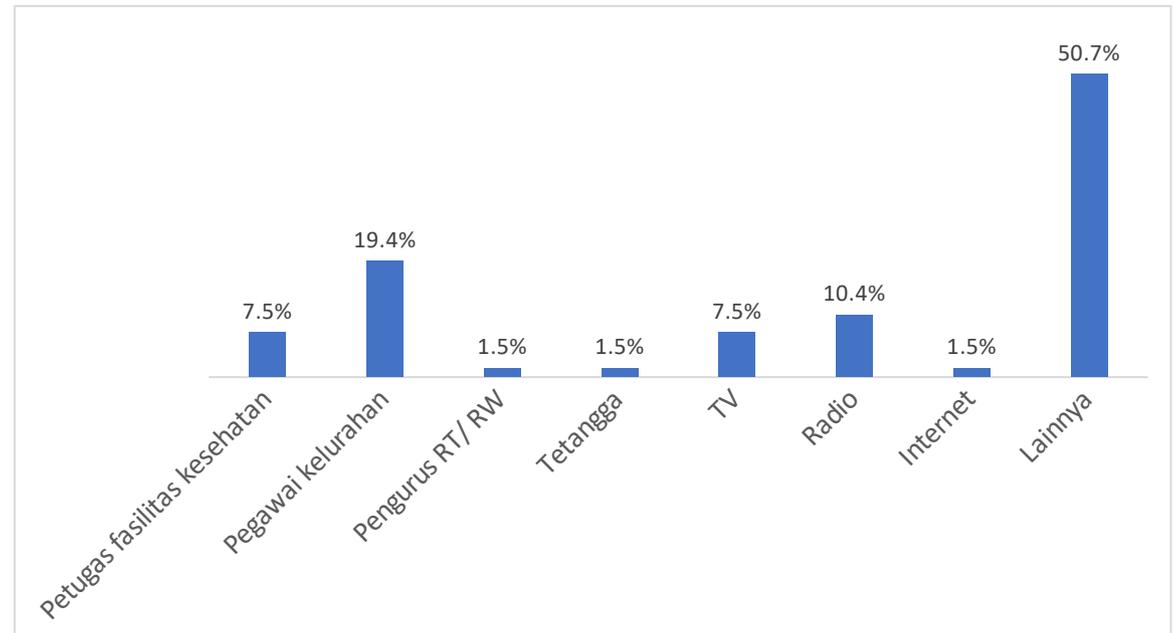


# 7. SEPUTAR KARTU PENYANDANG DISABILITAS

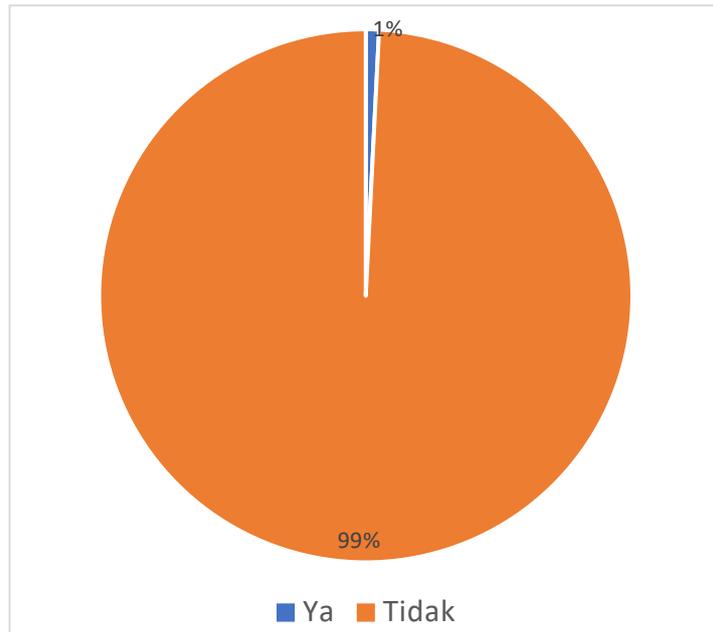
## ◆ Pengetahuan Mengenai KPD (N=798)



## Tahu darimana tentang KPD (N=67)



## ◆ Kepemilikan Kartu KPD (N=786)



Penyandang Disabilitas tidak memiliki KPD karena tidak tahu (88.1%).

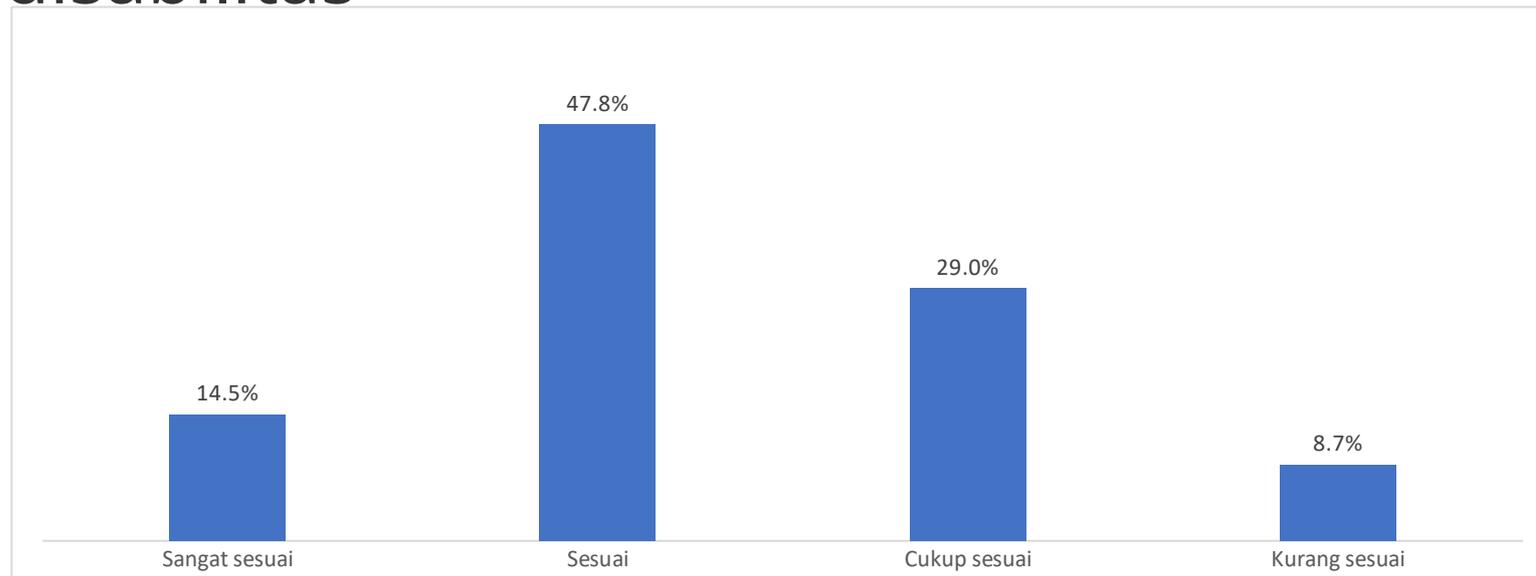
Bagi yang memiliki KPD, tahu KPD dari pegawai kelurahan (16.7%) dan sisanya tahu saat dibagikan organisasi penyandang disabilitas (N=6).

Gratis untuk KPD.

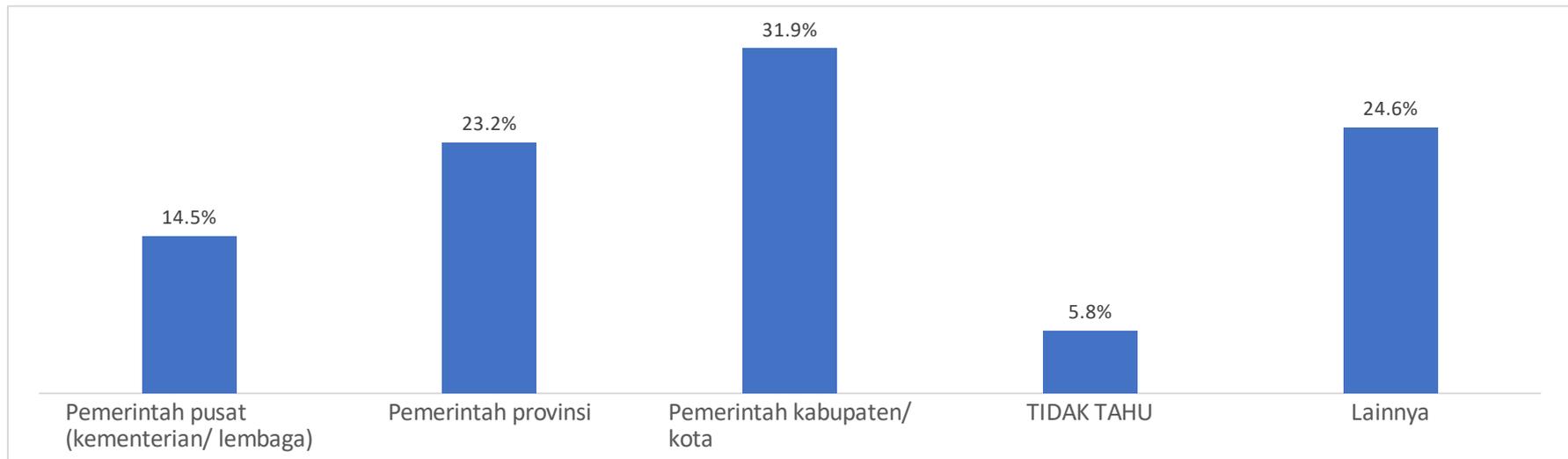
# 8. BANTUAN PEMERINTAH

- ◆ Pengalaman Mendapat Alat Bantu (N=791): tidak mendapat bantuan (91%)

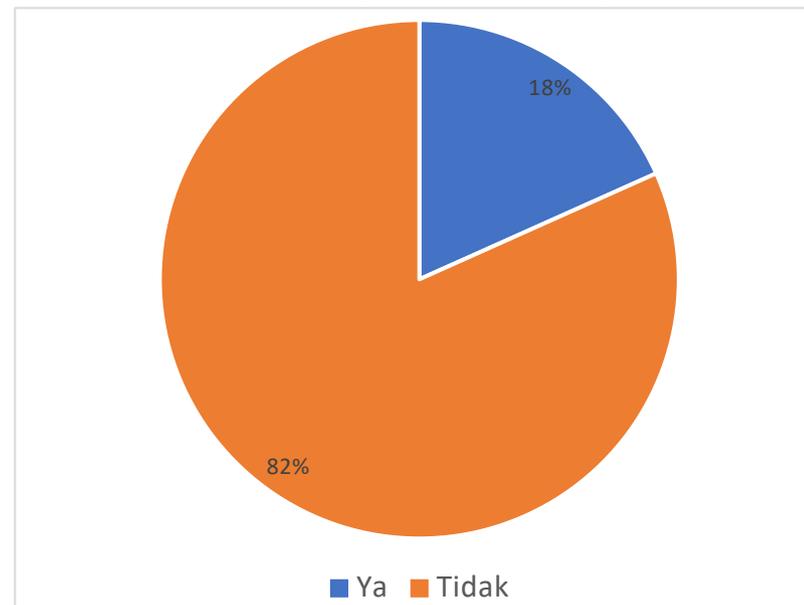
Kesesuaian Bantuan (N=69) untuk 5 jenis disabilitas



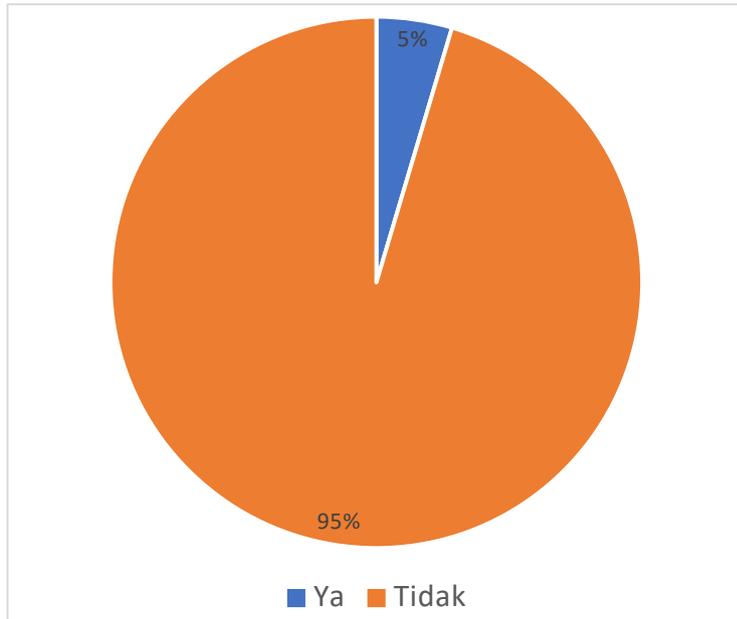
## Asal bantuan pemerintah (N=69)



## ◆ Pendataan oleh Pemerintah (N=789)

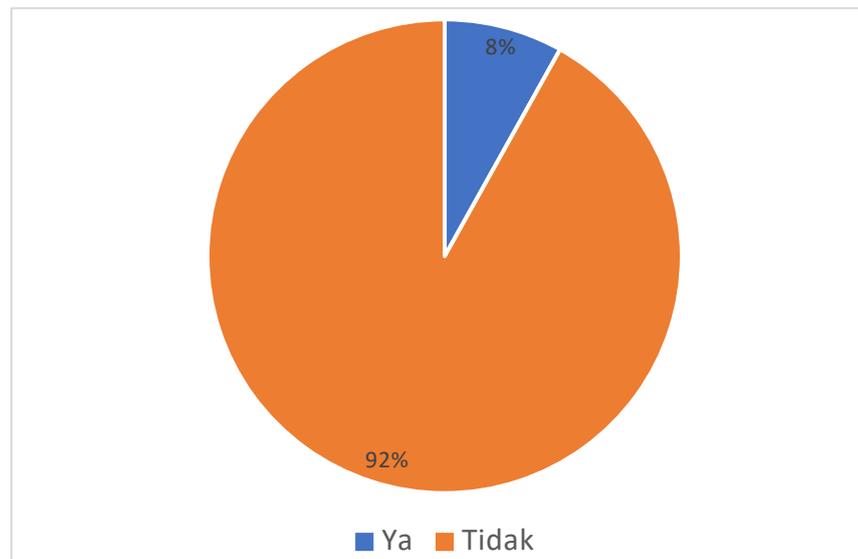


## Pendataan oleh Pemerintah Pusat (N=777)



» Pendataan oleh Pemerintah Daerah (N=789) menyatakan tidak (80,6%)

◆ Akses Informasi Pengadaan Bantuan dari Pemerintah Daerah (N=781)

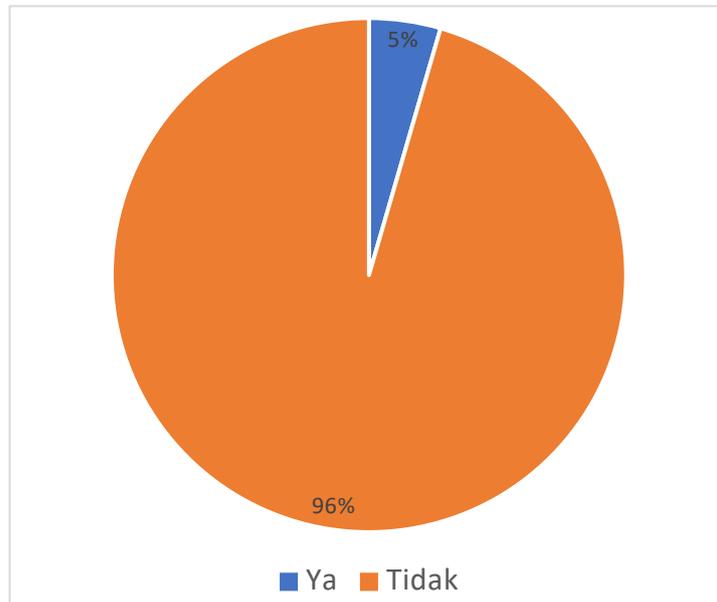




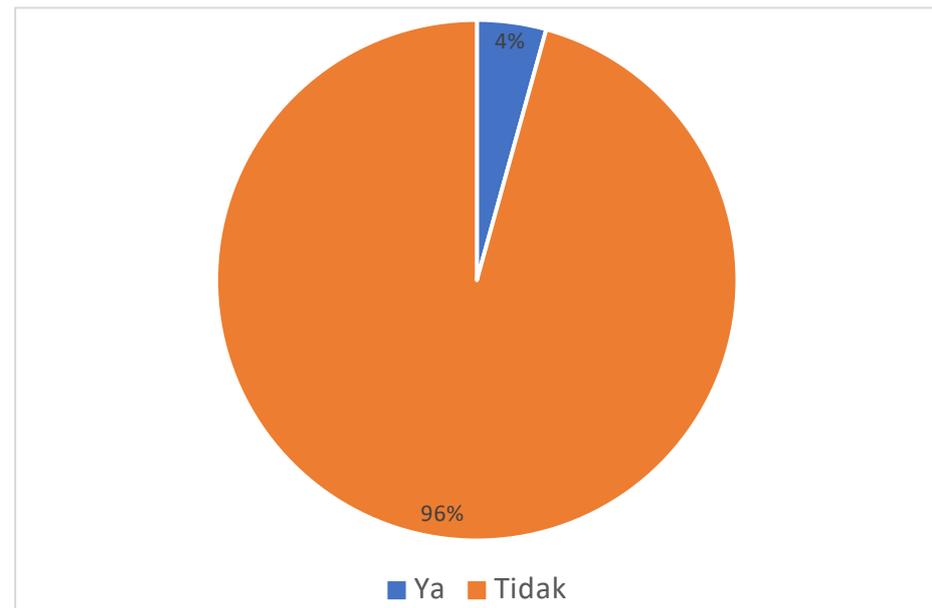
Akses Informasi Pengadaan Bantuan dari Pemerintah Pusat (N=786): tidak tahu cara akses informasi (96.7%)

- ◆ Penyediaan Informasi Bantuan untuk Disabilitas (N=793) menyatakan pemerintah daerah (60.3%) tidak menyediakan informasi tersebut dan pemerintah pusat juga tidak menyediakannya 62.4% (N=785)
- ◆ Akses Informasi (N=789): penyandang disabilitas tidak mendapat akses informasi bantuan dari Pemerintah Daerah (94.4%) dan dari Pemerintah Pusat 96.9% (N=783)

## ◆ Pengetahuan Mengenai Anggaran dari Pemerintah Pusat (N=792)



## Anggaran dari Pemerintah Daerah (N=790)





# KESIMPULAN

1. Survei ini ditujukan untuk mendapat gambaran mengenai akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Responden diambil secara acak (*random*) sehingga hasil survei mewakili penyandang disabilitas di 4 kota survei (Bandung, Solo, Makassar, dan Kupang).

- 
2. Penyandang disabilitas berada dalam situasi yang rentan. Hal ini karena keterbatasan kondisi mereka. Dari semua jenis penyandang disabilitas (fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda) mayoritas berpendidikan rendah. Proporsi terbesar adalah penyandang disabilitas intelektual dimana sebanyak 63.8% tidak pernah sekolah (atau tidak lulus sekolah dasar) dan 20% berpendidikan dasar (lulus SD/SMP). Dari semua jenis penyandang disabilitas (fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda) sebagian besar tidak bekerja (menganggur). Proporsi terbesar adalah penyandang disabilitas intelektual, dimana 83.8% tidak bekerja. Untuk penyandang disabilitas fisik, separuhnya (50.2%) tidak bekerja (menganggur).
  3. Terkait dengan akses terhadap fasilitas kesehatan, secara umum penyandang disabilitas bisa mengaksesnya. Mayoritas mengatakan Puskesmas (43%) dan RSUD (27.6%). Hanya saja, mereka mengalami beberapa kesulitan sebagai berikut: sebanyak 12.4% pernah kesulitan alat transportasi, 7.9% kesulitan karena kualitas jalan yang buruk, 6.6% kesulitan karena lokasi yang sulit dijangkau, dan 19% kesulitan tidak ada pendamping ke fasilitas kesehatan.
  4. Penyandang disabilitas menilai fasilitas kesehatan sudah cukup baik. Hanya saja mereka menilai fasilitas kesehatan yang ada belum cukup mengakomodasi kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas. Banyak fasilitas yang dinilai tidak ada. Jumlah penyandang disabilitas yang menilai fasilitas berikut tidak ada adalah sebagai berikut: handrail/pegangan rambat (58.4%), kursi roda (34.5%), komputer pembaca nomor urut (50.9%), huruf braille (90.1%), toilet penyandang disabilitas (72.2%) dan loket/jalur khusus penyandang disabilitas (85%).
  5. Selain fasilitas kesehatan yang belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, tenaga kesehatan juga dinilai belum mampu menangani kebutuhan penyandang disabilitas. Mayoritas (74.1%) mengatakan tenaga kesehatan tidak mampu, dan hanya 25.9% yang mengatakan mampu.

6. Karena keterbatasan dan posisi penyandang disabilitas yang rentan, penyandang disabilitas memerlukan bantuan diantaranya asuransi kesehatan. Sebanyak 71.6% penyandang disabilitas mengatakan mempunyai kartu JKN dan 28.4% tidak memiliki. Mereka yang tidak memiliki kartu asuransi JKN mayoritas menjawab karena tidak tahu (34.3%), tidak pernah didata (25.7%) dan tidak ada yang mengurus (14.8%). Terkait dengan pengalaman dalam menggunakan kartu asuransi tersebut, penyandang disabilitas umumnya menjawab tidak mengalami masalah.
7. Mayoritas penyandang disabilitas (92.2%) tidak mengetahui program Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Hampir seluruh penyandang disabilitas (99.2%) tidak memiliki Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Mereka yang tidak memiliki kartu KPD, mayoritas (88.1%) beralasan tidak tahu adanya KPD dan tidak pernah didata.
8. Hanya sedikit sekali penyandang disabilitas yang pernah mendapat alat bantu. Mayoritas (91%) penyandang disabilitas di 4 kota (Bandung, Solo, Makassar dan Kupang) tidak pernah mendapat alat bantu dari pemerintah. Survei ini juga menemukan adanya pendataan yang buruk terhadap penyandang disabilitas. Sebanyak 81.7% penyandang disabilitas mengatakan tidak pernah didata oleh pemerintah daerah dan 95.4% mengatakan tidak pernah didata pemerintah pusat.
9. Hasil survei juga memperlihatkan akses informasi yang kurang terhadap penyandang disabilitas. Mereka tidak tahu cara mengetahui adanya bantuan atau anggaran terkait dengan disabilitas. Penyandang disabilitas tidak mempunyai cukup akses informasi akan adanya bantuan, baik dari pemerintah daerah ataupun pusat. Sebanyak 91.9% penyandang disabilitas tidak tahu cara akses informasi pengadaan dari pemerintah daerah dan 96.7% dari pemerintah pusat. Hampir seluruh penyandang disabilitas (juga tidak mengetahui anggaran-anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyandang disabilitas (terkait program bantuan untuk penyandang disabilitas).



TERIMA KASIH